

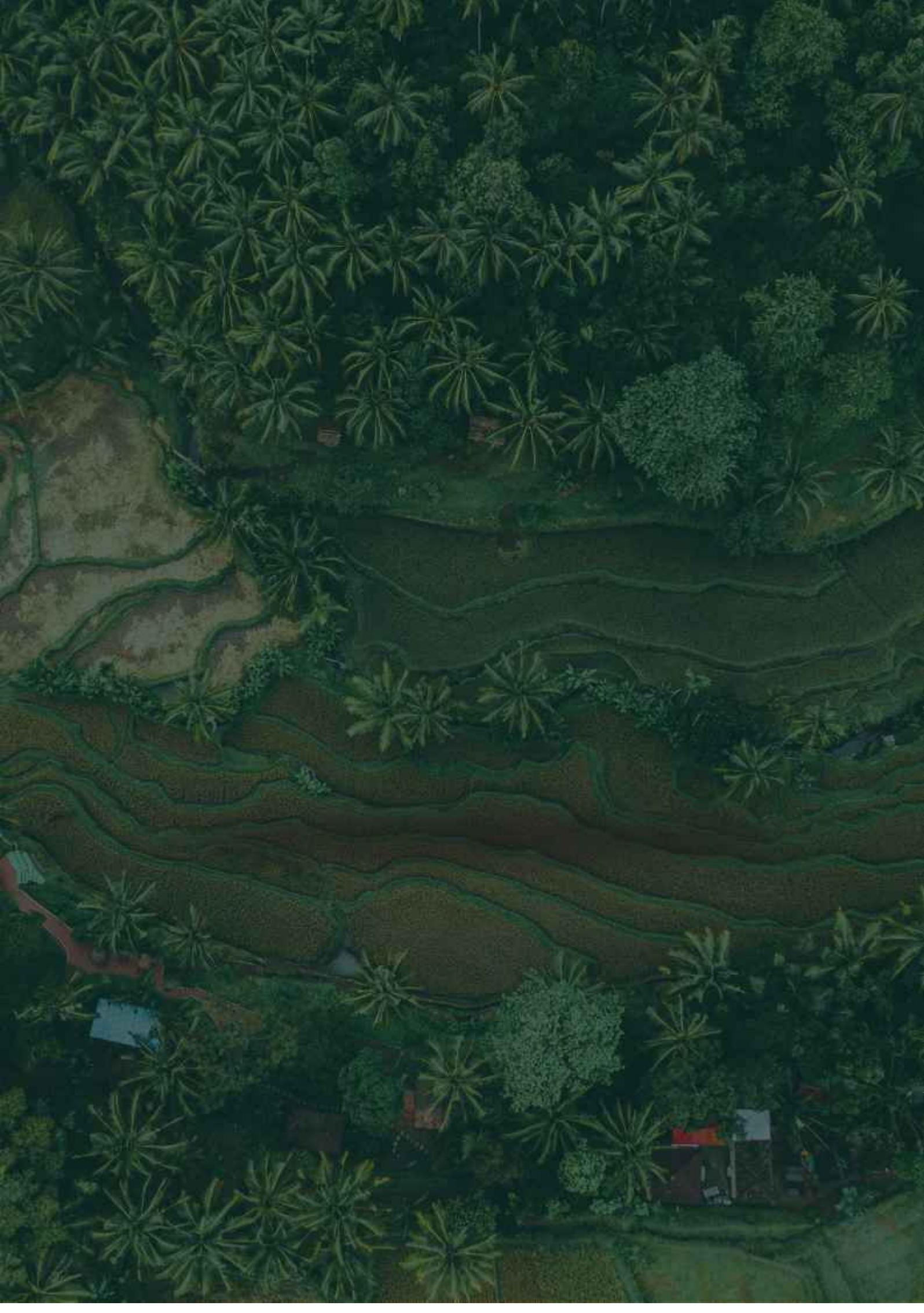


Laporan Kinerja 2024

PUSAT PENYULUHAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

© 2024 Pusat Penyuluhan





Laporan Kinerja 2024 PUSAT PENYULUHAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

© 2024 Pusat Penyuluhan



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pusat Penyuluhan Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban Satker Pusat Penyuluhan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan kinerja ini memuat uraian tentang gambaran umum, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja Pusat Penyuluhan. Selain itu Laporan Kinerja juga memuat permasalahan yang dihadapi satker selama tahun 2024 dan upaya tindak lanjut.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Pusat Penyuluhan tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.728.707.804,- atau 99,98% tanpa memperhitungkan blokir anggaran. Pusat Penyuluhan telah melaksanakan kegiatan dengan efektif dan efisien.

Atas tersusunnya laporan ini disampaikan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu mulai dari persiapan sampai dengan selesainya laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam upaya penyuluhan dan pendampingan terhadap pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

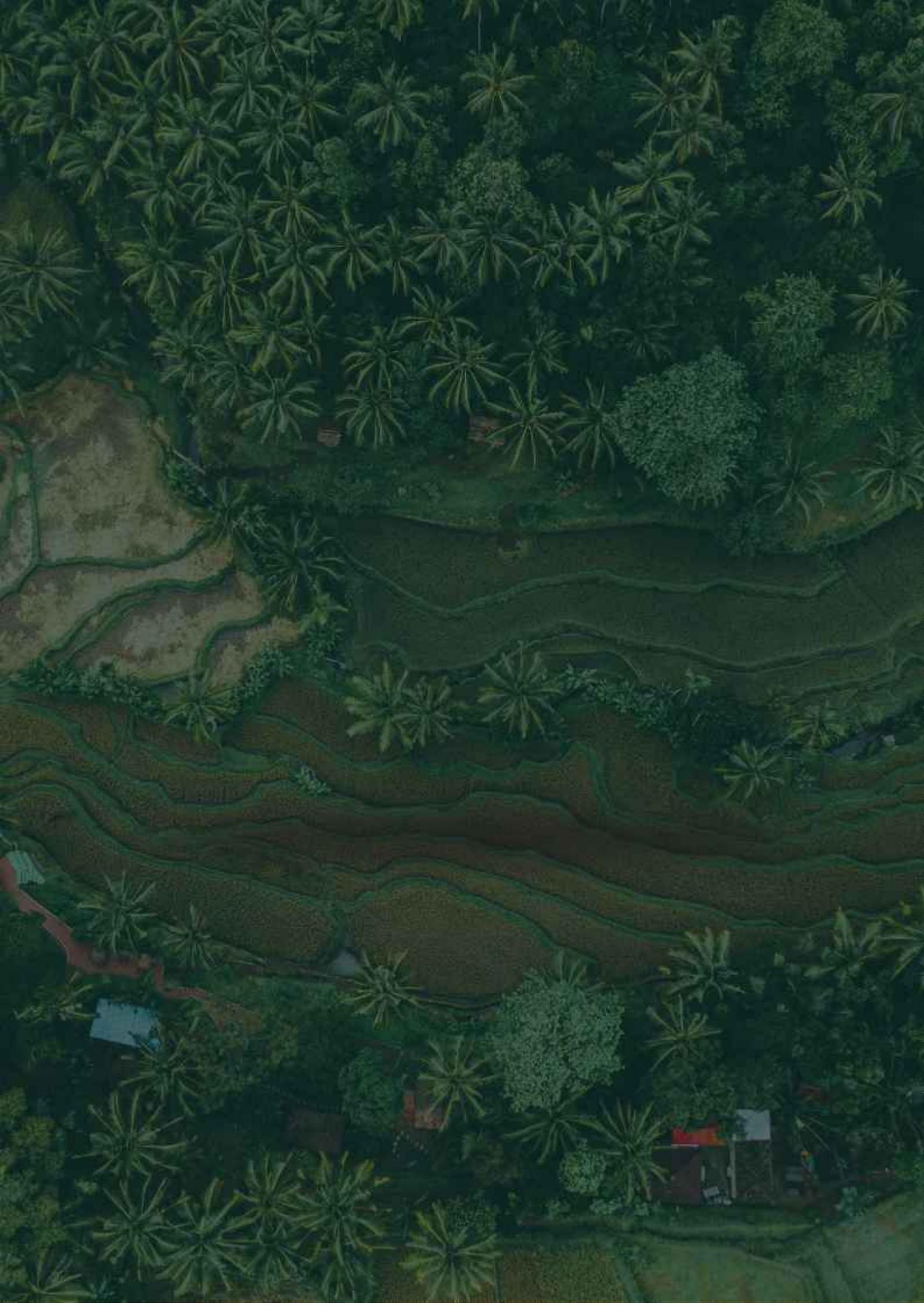


Jakarta, 17 Januari 2025

Kepala Pusat,

Wahju Rudianto, S/Pi, M.Si

NIP. 19691016 199403 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Pusat Penyuluhan dapat diukur melalui pencapaian 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penyuluhan dengan Kepala Badan P2SDM. Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2024 disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang juga memuat berbagai keberhasilan maupun kekurangan capaian IKK dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan peningkatan penyuluhan.

Sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023, IKK yang dimiliki Pusat Penyuluhan meliputi : (1) Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal); (2) Jumlah KTH (KTH Mandiri); dan (3) Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan.

Hasil pengukuran rata-rata capaian kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2024 yaitu sebesar 100% dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 17.728.707.804,- atau 99,98% dari total pagu anggaran sebesar Rp.18.291.486.000,- dengan total anggaran terblokir (*Automatic Adjustment* dan blokir anggaran 524) yang masih menempel pada pagu anggaran sebesar Rp. 558.489.000,-. Adapun rasio efektivitas capaian kinerja sebesar 1 dan rasio efisiensi capaian kinerja sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Penyuluhan telah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target kinerja Pusat Penyuluhan.



100%
Capaian
Kinerja



99,98%
(Rp. 17.728.707.8004)
Realisasi
Anggaran

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 tidak terlepas dari kendala anggaran fasilitasi yang rendah sehingga memperkecil ruang gerak pengembangan KTH yang mengakibatkan banyaknya pembatasan kegiatan baik dari sisi kesiapan unsur penyelenggara maupun di sisi masyarakat dan pemerintah daerah dimana lokasi masyarakat berada. Meskipun demikian, Pusat Penyuluhan berkomitmen untuk terus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

IKK 1 **100%**
Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal) sebanyak 4.500 orang

IKK 2 **100%**
Jumlah KTH (KTH Mandiri) sebanyak 100 KTH

IKK 3 **100%**
Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan sebanyak 50 KTH



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
	DAFTAR ISI	v
1	PENDAHULUAN	
	Latar Belakang	02
	Tugas Pokok dan Fungsi	03
	Struktur Organisasi	04
	Sumber Daya Manusia	05
	Aset BMN Pusat Penyuluhan	06
2	PERENCANAAN KINERJA	
	Perencanaan Kinerja	10
	Rencana Strategis Tahun 2020-2024	12
	Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023	17
	Perjanjian Kinerja	19
	Benchmarking Kinerja	20
3	AKUNTABILITAS KINERJA	
	Reviu atas Dokumen Perencanaan	24
	Reviu atas Hasil Evaluasi SAKIP	26
	Metode Pengukuran Kinerja	28
	Hasil Pengukuran Kinerja	29
	Efektivitas Capaian Kinerja	30
	Indikator Kinerja 1	35
	Indikator Kinerja 2	49
	Indikator Kinerja 3	56
	Realisasi Anggaran	69
4	PENUTUP	
	Penutup	73
	LAMPIRAN	



1

PENDAHULUAN



Menteri dan Wamen LHK
pada Pasar Raya Wana Lestari 2024

1.1. LATAR BELAKANG

Pusat Penyuluhan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Penyuluhan mengemban amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pusat Penyuluhan melaksanakan tugas berlandaskan pada asas *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini disusun sebagai perwujudan tanggung jawab dan pelaporan kinerja Pusat Penyuluhan sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Laporan ini juga dimaksudkan sebagai masukan dan pertimbangan dalam perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan di masa yang akan datang.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 01** Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

- 02** Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

- 03** Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

- 04** Bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

- 05** Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan

- 06** Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan administrasi Pusat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penyuluhan berkedudukan sebagai Eselon II yang dikepalai oleh Kepala Pusat. Pusat Penyuluhan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana struktur organisasi pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Tahun 2024.



1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

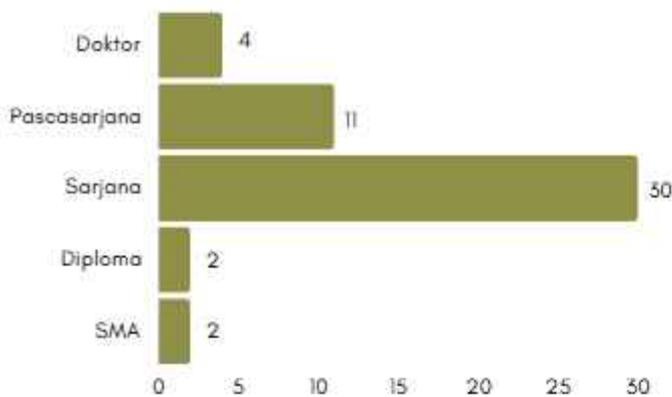
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target kinerja, pada tahun 2024 Pusat Penyuluhan didukung oleh 49 orang pegawai yang terdiri dari 47 orang Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan 2 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan sebaran sebagaimana tabel berikut:

Jenis Kelamin

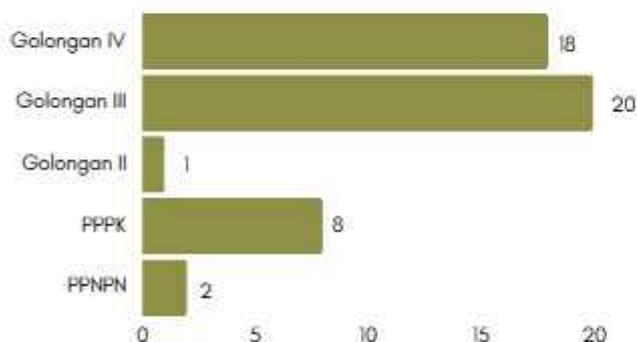


Gambar 1.2. Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan jenis kelamin.

Pendidikan



Golongan



Tabel 1.1. Peta Jabatan Pusat Penyuluhan.

No	Nama Jabatan	Jumlah
PUSAT PENYULUHAN		49
I	Kepala Pusat Penyuluhan	1
II	SUB BAGIAN TATA USAHA	8
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
2	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1
3	Analisis Keuangan	1
4	Bendahara	1
5	Verifikator Keuangan	1
6	Pengelola BMN	1
7	Staf PPNPN	2
III	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	35
1	Penyuluh Kehutanan Utama	4
2	Penyuluh Kehutanan Madya	11
3	Penyuluh Kehutanan Muda	9
4	Penyuluh Kehutanan Pertama	6
5	Perencana Ahli Madya	1
6	Perencana Ahli Pertama	3
7	Pranata Komputer	1
IV	JABATAN PELAKSANA TEKNIS	5
1	Analisis Metode Penyuluhan	1
2	Analisis Kapasitas Penyuluhan	3
3	Analisis Kelembagaan Masyarakat	1

1.5.ASET BMN PUSAT PENYULUHAN

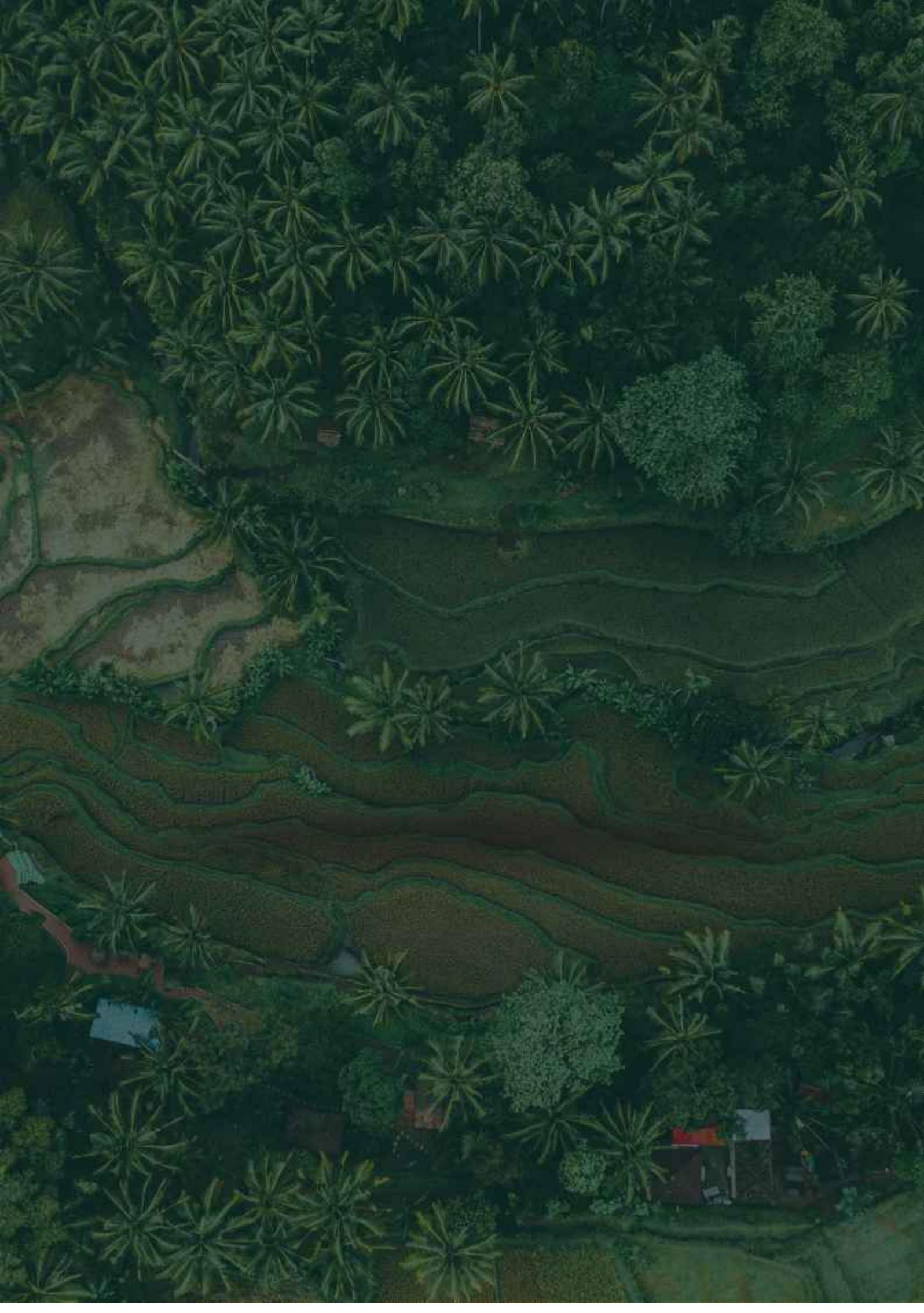
Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusat Penyuluhan memiliki aset atau Barang Milik Negara (BMN). Aset yang dikelola oleh Pusat Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

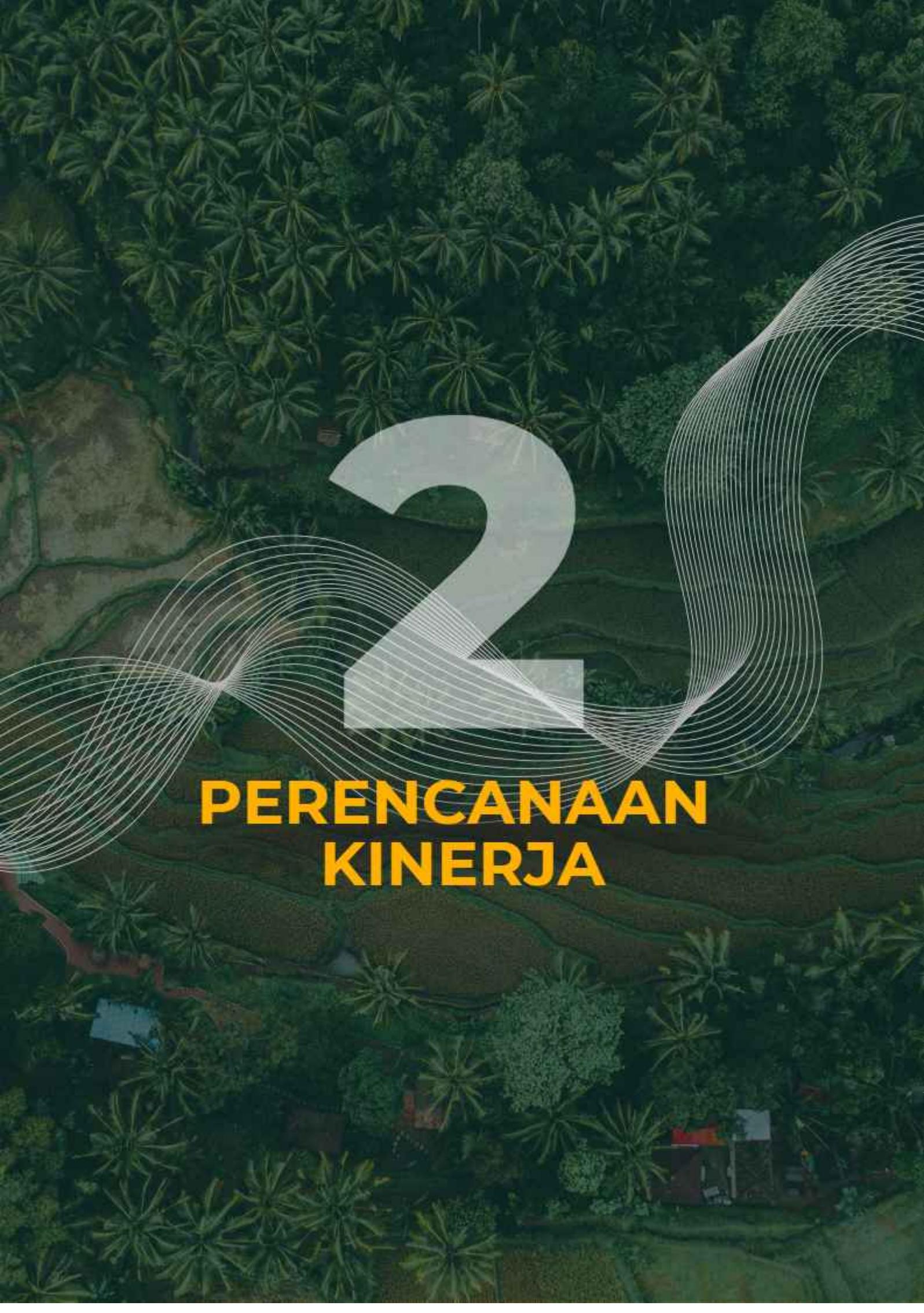
Tabel 1.2. Aset BMN Pusat Penyuluhan.

Kode Barang	Jenis Barang	Jumlah Unit	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
3020101001	Jeep	1	1	-	-
3020104001	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10	9	-	1
3020104001	Sepeda Motor	1264	14	1250	-
3050104001	Lemari Besi Metal	12	12	-	-
3050104002	Lemari Kayu	5	5	-	-
3050104005	Filing Cabinet Besi	4	4	-	-
3050104007	Brandkas	5	5	-	-
3050104009	Kardex Besi	8	8	-	-
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	1	1	-	-
3050105010	Copy Board/Electric White Board	1	1	-	-
3050105048	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal (Meja Podcast)	1	1	-	-
3050201002	Meja Kerja Kayu	40	40	-	-
3050201003	Kursi Besi/Metal	67	67	-	-
3050201005	Kursi/Sofa Tamu	1	1	-	-
3050201008	Meja Rapat	1	1	-	-
3050201009	Meja Komputer	14	14	-	-
3050204001	Lemari Es	3	3	-	-
3050204004	A.C Portable	2	2	-	-
3050204005	A.C Split	6	6	-	-
3050206002	Televisi	2	2	-	-
3050206017	Unit Power Supply	1	1	-	-
3050206036	Dispenser	1	1	-	-
3050206058	Gordyin/Kray	2	2	-	-
3050206068	DVD Player	2	-	-	2
3060102128	Camera Digital	5	5	-	-
3060102132	Video Conference	1	1	-	-
3060105038	GPS Receiver	5	5	-	-
3060105047	Kamera Udara/Drone	1	1	-	-
3060201001	Telephone (PABX)	1	1	-	-
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	2	2	-	-
3060201010	Facsimile	1	1	-	-

Kode Barang	Jenis Barang	Jumlah Unit	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
3060405001	Message Switching Center (MSC)	1	1	-	-
3080715005	Lighting Equipment	1	1	-	-
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	-	-
3100102001	P.C Unit	18	18	-	-
3100102002	Lap Top	30	30	-	-
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	30	-	-
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	6	-	-
3100203010	CD Writer	1	1	-	-

Aset paling banyak adalah sepeda motor sejumlah 1.264 unit yang merupakan pengadaan tahun 2006, 2007, 2010, dan 2013 yang tersebar diberbagai provinsi, dan saat ini secara bertahap dilakukan proses penghapusan melalui hibah. Pada bulan Desember 2024 BMN yang rusak berat telah disetujui penghapusannya dan dalam proses pengajuan lelang ke KPKNL Jakarta.



An aerial photograph of a lush tropical forest, primarily composed of palm trees. A large, semi-transparent white number '2' is centered in the upper half of the image. To the right of the number, a series of thin, white, wavy lines flow across the frame, creating a sense of movement and design. The overall color palette is dominated by various shades of green, with the white elements providing high contrast.

2

**PERENCANAAN
KINERJA**

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang bertema "Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025-2029, serta menjaga stabilitas dalam menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2024. Semangat yang diusung dalam RKP Tahun 2024 itu diimplementasikan dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 yang bertema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan "Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata" dengan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sasaran makro ekonomi dalam pembangunan LHK tahun 2024, diantaranya adalah (1) Pertumbuhan 3-4% PDB dan ekspor sektor LHK yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas; (2) Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebesar 5-7% yang ditunjukkan dengan nilai transaksi keuangan kelompok untuk mendorong pemerataan pembangunan; (3) Penurunan beban lingkungan sebesar 2-3% dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan. Dalam konteks pembangunan nasional, pada tahun 2024 Agenda Pembangunan (AP) / Prioritas Nasional (PN) masih sesuai dengan RPJMN tahun 2020 - 2024 dengan 7 Prioritas Nasional sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.1. Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam 4 dari 7 Prioritas Nasional, yaitu :

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN 1);
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2);
- Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN 3); dan
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6).



Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas, 2023

Gambar 2.1. Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.

Dari 4 (empat) PN yang menjadi agenda Kementerian LHK, Badan P2SDM mendukung 3 (tiga) PN yaitu : PN-1, PN-3 dan PN-6. Adapun kegiatan pada Pusat Penyuluhan termasuk ke dalam PN-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Secara lebih rinci kegiatan Pusat Penyuluhan yang termasuk ke dalam PN-3 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kegiatan Pusat Penyuluhan dalam Mendukung Prioritas Nasional 3.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Proyek K/L (Rincian Output)
Pengentasan Kemiskinan	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kapasitas Penyuluhan dan/atau pendamping yang handal
			KTH Mandiri yang terbentuk
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tidak terlepas dari kontribusi sumber daya manusia yang mengelolanya. Sumber daya manusia LHK harus dapat bersaing secara global, dapat beradaptasi dan berdaya saing dengan kemajuan teknologi. Sejalan dengan hal tersebut langkah Kementerian LHK dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya fokus pada kebijakan sumber daya alam saja, tetapi juga diikuti dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Untuk memberikan arah pengembangan sumber daya manusia LHK. Pada tahun 2022, terdapat penyesuaian arsitektur kinerja Kementerian LHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Dengan adanya perubahan arsitektur kinerja, berdasarkan dokumen Revisi Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024, terdapat beberapa pemutakhiran dan optimalisasi kinerja utama Kementerian LHK. Perubahan pada dokumen Renstra Kementerian LHK tahun 2020-2024 (Revisi) ini tetap mengacu pada peran sektor LHK dalam RPJMN 2020-2024 yang mendasar dan substantif terhadap Renstra sebelumnya.

Perubahan Indikator Kinerja pada dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020- 2024 yaitu meleburnya indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan peningkatan penyuluhan yang meliputi: Indikator Kinerja Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dan Indikator Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya. Pada perubahan baru, indikator kinerja yang disebutkan pada dokumen adalah "Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan". Perubahan indikator kinerja ini disusun sebagai penyempurnaan muatan kinerja sebelumnya. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan menjadi hasil akhir yang diukur untuk melihat dampak intervensi BP2SDM pada penyuluhan melalui pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan. Dengan kata lain, Indikator kinerja kelembagaan kelompok masyarakat dan indikator kinerja penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya masih menjadi kinerja di Pusat Penyuluhan. Sedangkan hasil dari kegiatan tersebut menjadi ukuran kinerja BP2SDM.

Sebagai penjabaran dan penyesuaian Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan P2SDM yang menjadi kinerja Pusat Penyuluhan, maka disusunlah *Cascading* Peta Arsitektur Kinerja untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian LHK serta Sasaran dan Indikator Kinerja Badan P2SDM dengan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Penyuluhan sebagaimana Gambar 2.2. berikut.



Gambar 2.2. *Cascading* Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024.

Sebagai upaya untuk menjabarkan dan menyelaraskan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, disusunlah *cascading* peta arsitektur kinerja. Peta ini berfungsi sebagai alat yang menggambarkan hubungan dan konsistensi antara Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian KLHK dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Melalui *cascading* peta arsitektur ini, ditunjukkan secara rinci kontribusi dan dukungan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mencapai Sasaran Strategis Kementerian KLHK. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki keterkaitan langsung dengan prioritas strategis kementerian, sehingga mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. *Cascading* peta arsitektur kinerja juga berperan penting dalam mempermudah proses monitoring dan evaluasi, dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai keterhubungan antara tingkat kebijakan strategis dengan implementasi di lapangan.

POHON KINERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2024



Pohon kinerja merupakan alat bantu untuk mengawal struktur logika hubungan sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan untuk menghasilkan outcome. Penyusunan pohon kinerja diibaratkan seperti mengurai jalur kinerja secara logis yang dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome sehingga peran dari setiap tingkatan organisasi dapat terjabarkan dan Indikator Kinerja terbagi habis dari tingkat Kementerian sampai dengan tingkat Satuan Kerja. Penjabaran kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran Strategis Kementerian LHK dijabarkan sebagaimana Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Pohon Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta sejalan dengan Revisi Rencana Strategis Kementerian LHK 2020 – 2024 dan Revisi Rencana Strategis Badan P2SDM, Pusat Penyuluhan mendukung program Badan P2SDM pada Prioritas Nasional 3 (PN-3) yang dilakukan melalui program prioritas “Pengentasan Kemiskinan” melalui kegiatan “Penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan” yang memiliki sasaran meningkatnya daya saing pelaku utama dan pelaku usaha menuju masyarakat yang mandiri. Kegiatan dan sasaran Pusat Penyuluhan ini telah disesuaikan dengan penyesuaian arsitektur kinerja Kementerian LHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Startegis Pusat Penyuluhan tahun 2020-2024 merupakan instrumen dasar kerangka kerja penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Penyuluhan selama jangka waktu satu periode 5 (lima) tahun secara terarah dan berkesinambungan guna mendukung penyelenggaraan program Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024, diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.39/LUH/PP/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Penyuluhantahun 2020-2024. Adanya perubahan Struktur organisasi dan tata kerja pada Kementerian LHK maka dilakukan penyesuaian terhadap arsitektur kinerja Kementerian LHK sehingga Rencana Strategis tersebut direvisi berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.26/LUH/TU/DIK.3/9/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.39/LUH/PP/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Penyuluhan tahun 2020-2024.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat Penyuluhan mendukung 1 (satu) Kegiatan Utama yang ada di Badan P2SDM dengan penjabaran selanjutnya pada 3 Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Pusat Penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penyuluhan dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kegiatan pada Pusat Penyuluhan di Tahun 2023 memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu :

1. Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal);
2. Jumlah KTH (KTH Mandiri); dan
3. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan.

Adapun target kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan merupakan target yang akan dicapai oleh Pusat Penyuluhan hingga tahun 2024. Dengan adanya perubahan arsitektur kinerja, rincian besaran target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 juga mengalami penyesuaian. Rincian target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan sebagaimana hasil penyesuaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Target Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020 – 2024.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5444 - Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	460 Orang	1030 Orang	1700 Orang	14.405 Orang	14.405 Orang
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)	110 Unit	65 Unit	90 Unit	617 Unit	618 Unit
	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	10 Unit	38 Unit	50 Unit	426 Unit	426 Unit

2.2. RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN TA. 2024

Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan pada awal Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 17.529.206.000,- yang tertuang pada Surat Pengesahan DIPA Tahun 2023 Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM Nomor : SP DIPA- 029.08.1465019/2024 tanggal 24 November 2023. Pusat Penyuluhan dalam DIPA Tahun 2024 memiliki posisi sebagai Sub Satker yang anggaran kegiatannya menempel pada Kantor Pusat BP2SDM. Adapun DIPA Kantor Pusat Badan P2SDM meliputi anggaran kegiatan pada Sekretariat Badan P2SDM, Pusat Penyuluhan dan Pusat Perencanaan Pengembangan SDM LHK.

Pada tahun berjalan terdapat pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada semua K/L termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui mekanisme pencantuman blokir anggaran atau catatan halaman IV DIPA. Kemudian terdapat pemindahan anggaran dari belanja barang 52 ke belanja pegawai 51 Kantor Pusat BP2SDM sebesar Rp. 215.000.000,-, pada pertengahan tahun anggaran juga terdapat penambahan pagu anggaran dalam rangka pemenuhan Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan sebesar Rp. 953.280.000,-, serta penambahan belanja sewa kendaraan dinas operasional sebesar Rp. 24.000.000,- pada anggaran layanan perkantoran. Selanjutnya dalam

rangka menindaklanjuti surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/ Lembaga TA 2024 maka dilakukan penghematan belanja perjalanan dinas melalui mekanisme revisi pencantuman dalam halaman IV.A DIPA. Pagu yang telah terblokir tersebut sampai tahun anggaran berakhir masih menempel pada pagu Pusat Penyuluhan dengan total anggaran terblokir sebesar Rp. 558.489.000.000,-, sehingga pada akhir TA 2024, Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan menjadi Rp. 18.291.486.000,-.

Adanya perubahan pagu anggaran tersebut, juga diikuti dengan perubahan target IKK Pusat Penyuluhan. Target IKK yang mengalami perubahan adalah pada IKK Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal), semula berjumlah 1000 orang kemudian menjadi 4.500 orang. Peningkatan target IKK tersebut dikarenakan terdapat gap antara target dan capaian pada Renstra tahun 2020-2024, maka Pusat Penyuluhan mengusulkan penambahan target kinerja tersebut. Untuk memenuhi capaian dari target, dilakukan intervensi terhadap metode pelaksanaan yang semula *onsite* menjadi *hybrid* atau secara virtual. Perubahan target IKK dapat dilihat secara rinci sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perubahan Target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
		SATUAN	SEMULA	MENJADI
1	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Orang	1.000	4.500
2	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	Unit	100	100
3	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Unit	50	50

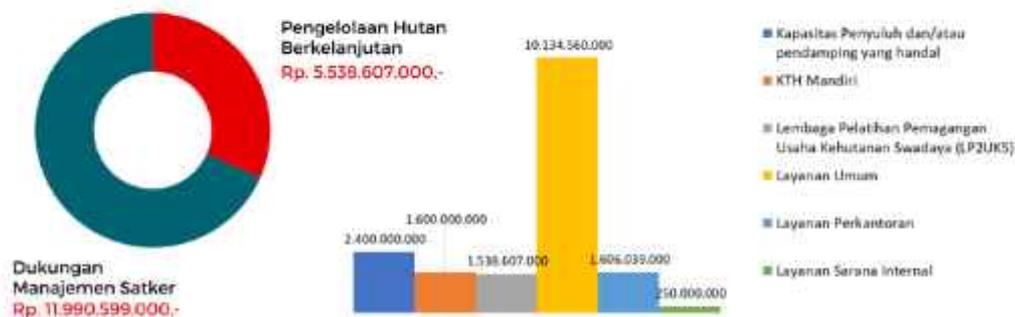
2.3. ALOKASI PAGU ANGGARAN TA. 2024

Dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan Peningkatan Penyuluhan dan Dukungan Manajemen Satker pada Pusat Penyuluhan Badan P2SDM, alokasi pagu anggaran per kegiatan pada awal TA. 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.3. di bawah ini.

Pagu Anggaran Awal TA. 2023

Rp. 17.529.206.000,-

Alokasi Pagu Anggaran per Rincian Output



Gambar 2.3. Alokasi Pagu Anggaran Awal TA. 2024.

Pada bulan Januari 2024 terdapat pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp.520.019.000,-. Kemudian terdapat penambahan pagu anggaran dalam rangka pemenuhan Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan pada bulan Juli 2024 sebesar Rp. 953.280.000,- yang menambahkan anggaran pada belanja barang non operasional lainnya serta penambahan biaya sewa kendaraan dinas operasional sebesar Rp.24.000.000,- dari layanan perkantoran Sekretariat BP2SDM ke layanan perkantoran Pusat Penyuluhan. Pada bulan November 2024, sesuai arahan Presiden RI terdapat penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 38.470.000,-. Blokir anggaran sebesar Rp. 558.489.000,- tersebut tidak mengurangi pagu anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2024, sehingga pagu anggaran Pusat Penyuluhan pada akhir TA. 2024 dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.4. di bawah ini.

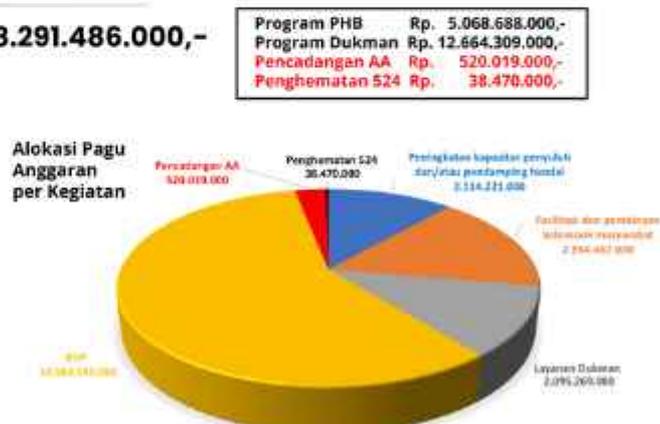
Pagu Anggaran Akhir TA. 2024

TA. 2024

Pagu Anggaran Rp. 18.291.486.000,-



Alokasi Pagu Anggaran per Kegiatan



Gambar 2.4. Alokasi Pagu Anggaran Akhir TA. 2024.



2.4. PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2024 dilakukan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Untuk menguatkan pencapaian kinerja tersebut, ditetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kerja antara Pimpinan Organisasi, yang dalam hal ini adalah Kepala Badan P2SDM dengan Kepala Satker di bawahnya, yaitu Kepala Pusat Penyuluhan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan IKK beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Badan P2SDM dengan Kepala Pusat Penyuluhan ditandatangani pada bulan Desember 2023 yang memuat target pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu :

1. Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) sebanyak 1.000 orang;
2. Jumlah KTH (KTH Mandiri) sebanyak 100 unit; dan
3. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan sebanyak 50 unit.

Sebagaimana perubahan yang terdapat pada Rencana Kerja Revisi (Dokumen Suplemen Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.28/LUH/TU/REN.4.6/12/2023), target capaian IKK dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 juga mengalami perubahan dikarenakan terdapat gap antara target dan capaian pada Renstra tahun 2020-2024, maka Pusat Penyuluhan mengusulkan penambahan target kinerja tersebut. Perjanjian Kinerja di revisi pada bulan April 2023 yang mana IKK 1 Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) sebanyak 1.000 orang ditingkatkan targetnya menjadi 4.500 orang sebagaimana dijelaskan secara lebih rinci pada Tabel 2.4.

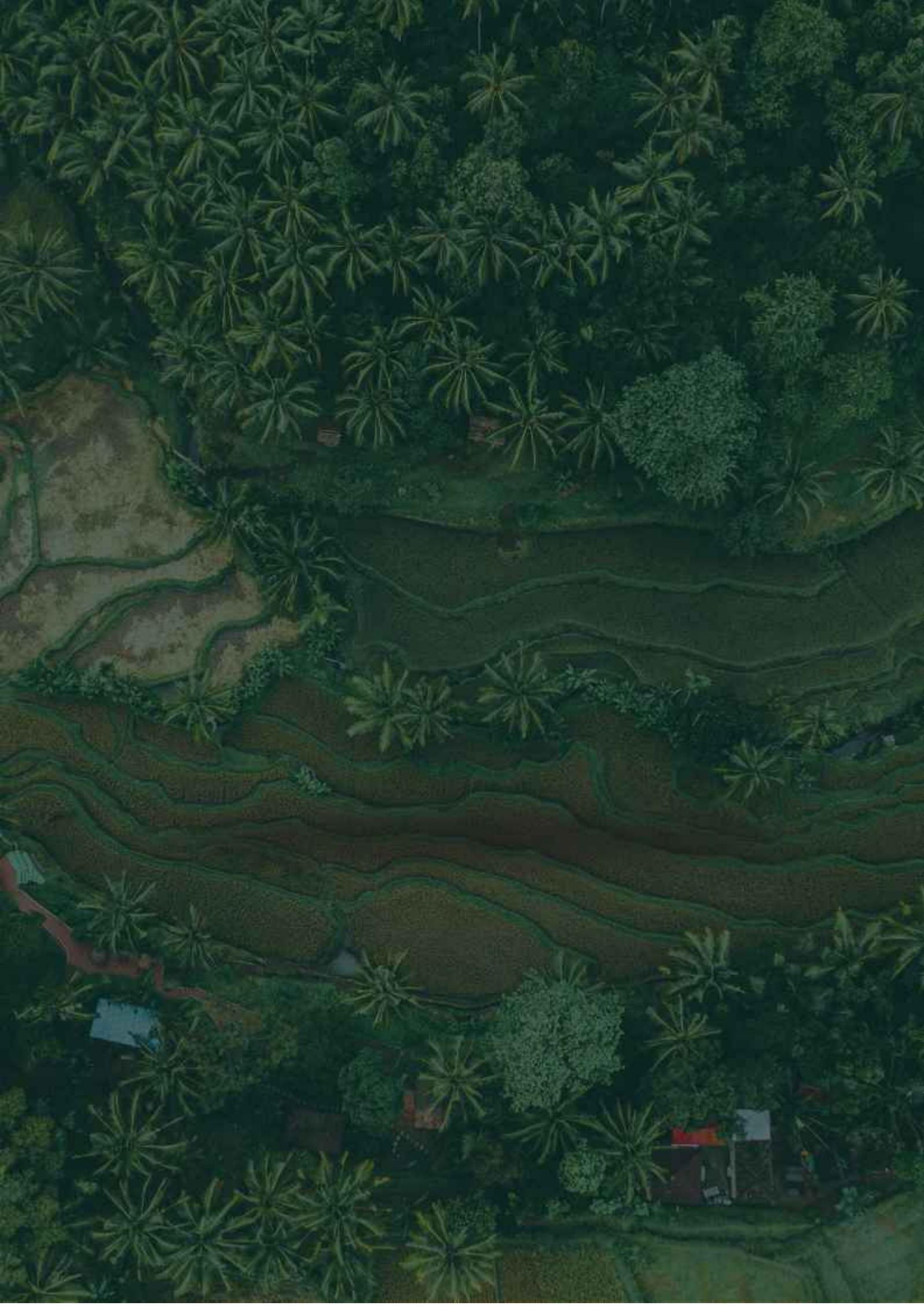
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2024
1	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Orang	4.500
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)	Unit	100
2	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Unit	50

Pagu awal : Rp. 17.529.206.000,-

Pagu akhir : Rp. 18.291.486.000,-*

*(termasuk anggaran yang tidak bisa digunakan atau terblokir sebesar Rp. 558.489.000,-)





3

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

3.1. REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN

Rencana Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan merupakan rencana kinerja anggaran yang sama pada lingkup Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Peningkatan Penyuluhan, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebesar Rp 58.147.979.000,-. Sepanjang Tahun Anggaran 2024 terdapat kebijakan *refocussing* ditergetkan pada sumber dan rupiah murni pada belanja non operasional dan belanja perjalanan dinas, pemenuhan belanja pegawai dan penambahan RO Layanan BMN. Hingga akhir tahun anggaran 2024 pagu anggaran Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia turun sebesar 2,29 persen dari pagu awal sebesar Rp. 56.818.311.000,-. Perincian perubahan anggaran tersebut disajikan sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1. Rincian perubahan anggaran pada Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

No.	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Tanggal Perubahan	Keterangan
1	58.147.979.000	58.147.979.000	25 Januari 2024	Revisi <i>Automatic Adjustment</i> (AA) Badan P2SDM TA 2024
2	58.147.979.000	58.147.979.000	16 Februari 2024	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan Satker yang sama dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dan Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.
3	58.147.979.000	58.147.979.000	22 April 2024	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan Satker yang sama dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dan Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.
4	58.147.979.000	58.147.979.000	29 Mei 2024	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan Satker yang sama dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dan Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.
5	58.147.979.000	60.758.891.000	2 Juli 2024	Penghapusan catatan Halaman IV-a berupa buka blokir kode 2 (Harus dilengkapi dokumen <i>clearance</i> terkait Pengembangan Aplikasi) dan Revisi Anggaran pada K/L berupa pergeseran antar program dalam satu unit kerja Eselon I.
6	60.758.891.000	60.758.891.000	11 Juli 2024	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dan Satker yang sama dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dan Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.

No.	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Tanggal Perubahan	Keterangan
7	60.758.891.000	61.712.171.000	30 Juli 2024	Penambahan Pagu Biaya Operasional Penyuluh Tahun 2024
8	61.712.171.000	61.712.171.000	28 Agustus 2024	Pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dan Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.
9	61.712.171.000	57.639.890.000	2 Oktober 2024	Pergeseran antar RO untuk pemenuhan RO generik baru (RO SBKU) lingkup Badan P2SDM dan Revisi Anggaran pada K/L berupa pergeseran antar program dalam satu unit kerja Eselon I.
10	57.639.890.000	56.818.311.000	22 Oktober 2024	Relaksasi Blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA) Kementerian LHK Tahun 2024 dan Optimalisasi Tahap II untuk pemenuhan belanja pegawai.
11	56.818.311.000	56.818.311.000	20 November 2024	Penghematan/ <i>self blocking</i> terkait Pembatasan Belanja Perjalanan Dinas secara mandiri.
12	56.818.311.000	56.818.311.000	12 Desember 2024	Pergeseran anggaran antar Unit Kerja Eselon I untuk Pemenuhan Belanja Pegawai dalam rangka Penyesuaian PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
13	56.818.311.000	56.818.311.000	24 Desember 2024	Pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dan Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.

3.2.Reviu atas Hasil Evaluasi SAKIP Pusat Penyuluhan BP2SDM

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Evaluasi terhadap SAKIP dilaksanakan setiap tahun guna menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas outcome program terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya *good governance* yang berorientasi hasil. Dalam peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021, komponen yang diukur dalam evaluasi SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Akuntabilitasn Kinerja Internal (25%).

Sebagaimana hasil rekomendasi evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya, Pusat Penyuluhan sebagai unit eselon II pada Badan P2SDM diwajibkan untuk melaksanakan penilaian SAKIP mandiri. Berdasarkan memo Kepala Badan P2SDM Nomor M.2/BP2SDM/SET.11/REN.3.4/B/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Hasil Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024 dan Penilaian Laporan Kinerja Satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2023, hasil penjaminan mutu evaluasi SAKIP mandiri yang telah dilakukan oleh Pusat Penyuluhan mendapat penilaian sebagaimana pada tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2. Hasil Penilaian SAKIP Mandiri Pusat Penyuluhan Tahun 2024

Komponen Nilai	Bobot	Nilai	Persen terhadap Bobot	Selisih Nilai dengan Bobot
Perencanaan Kinerja	30	26,39	87,97 %	3,61
Pengukuran Kinerja	30	25,48	84,93 %	4,52
Pelaporan Kinerja	15	13,24	88,27 %	1,76
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	72,00 %	7,00
Nilai Hasil Evaluasi	100	83,11	83,11 %	16,89
Tingkat Akuntabilitas	AA	A		

Dalam proses penilaian, Pusat Penyuluhan mendapat pengurangan nilai hasil evaluasi menjadi **80,11**, hal tersebut dikarenakan kebijakan yang diberikan oleh Tim Verifikasi Sekretariat BP2SDM salah satunya adalah pengurangan poin untuk satker yang tidak dapat menyelesaikan penilaian tepat waktu.

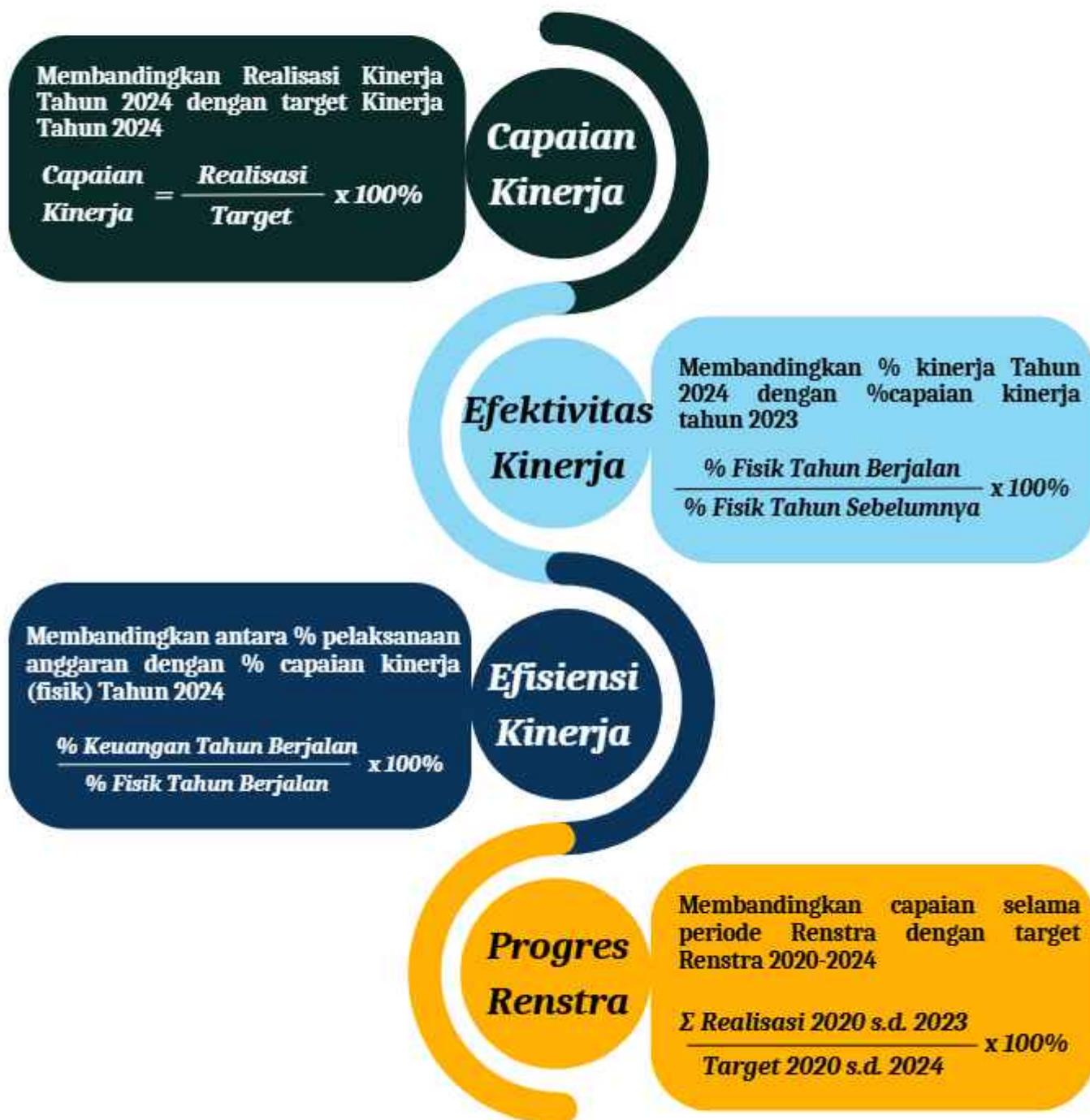
Dari hasil penilaian SAKIP mandiri tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Pusat Penyuluhan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya. Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Pusat Penyuluhan sebagaimana tabel 3.3. berikut

Tabel 3.3. Rekomendasi dan Tindaklanjut Hasil Penilaian SAKIP Mandiri Pusat Penyuluhan Tahun 2024

No	Rekomendasi	Upaya Tindak Lanjut
1	Mempedomani outline penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja (Resntra, Renja, Renaksi, Perjanjian Kinerja) sesuai yang tercantum pada Keputusan Menteri LHK nomor 975 tahun 2023	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja Pusat Penyuluhan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor 975 Tahun 2023
2	Setiap satker agar menyusun pohon kinerja masing-masing yang menggambarkan pembagian peran kerja antar bidang	Pada Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024 telah mencantumkan pohon kinerja.
3	Satuan kerja agar melengkapi dokumen perencanaannya dengan tanda tangan kepala satker, tanggal pengesahan dan mengupload pada website satker.	Dokumen Perencanaan Pusat Penyuluhan telah dilengkapi dengan tanda tangan Kepala Pusat dan di upload pada website Pusat Penyuluhan (www.pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id)
4	Melaksanakan Benchmarking kinerja dengan Unit Kerja Sejenis	Pada tanggal 13 November 2024, Badan P2SDM telah KLHK telah melaksanakan kegiatan benchmarking kinerja dengan BPPSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Menyusun dan menetapkan indikator kinerja dengan memperhatikan seluruh aspek dan risiko agar sustainable dan dapat direalisasikan, menantang serta realistis.	Pusat Penyuluhan akan menyusun Indikator Kinerja Kegiatan di dokumen Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2025-2029 dan Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2025 dengan memperhatikan seluruh aspek dan risiko agar sustainable dan dapat direalisasikan, menantang serta realistis.
6	Melaksanakan dan medokumentasikan pertemuan terkait monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja	Pusat Penyuluhan telah melaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan terkait monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja yang tertuang di dalam notulensi rapat dan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan.

3.3. METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Pengukuran dilakukan terhadap empat metode yaitu presentase capaian kinerja, progress terhadap pelaksanaan Renstra, efektivitas kinerja dan efisiensi kinerja. Adapun perhitungan menggunakan formula sebagaimana Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Metode Pengukuran Kinerja

3.4. HASIL PENGUKURAN KINERJA

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakikatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024 dengan realisasi pada tahun tersebut. Adapun hasil pengukuran kinerja Pusat Penyuluhan adalah sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2024 (Akhir)	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
1	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Orang	4.500	4.500	100%
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)	Kelompok Masyarakat	100	100	100%
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Kelompok Masyarakat	50	50	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja						100%
2	Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya	Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Triliun	0,5	1,433	286,60%
		Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan	Poin	80	80,11	100,14%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan	Poin	82,5	98,84	119,81%

Berdasarkan perhitungan Tabel 3.4., nilai rata-rata capaian kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Nilai rata-rata capaian ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2024 telah tercapai.

Dalam mencapai target kinerja, Pusat Penyuluhan memanfaatkan anggaran yang dibebankan kepada DIPA Satker Kantor Pusat Badan P2SDM sebagaimana tertuang pada Surat Pengesahan DIPA Tahun 2023 Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM Nomor : SP DIPA-029.08.1465019/2024 tanggal 24 November 2023. Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2024 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II sebesar Rp.17.529.206.000,- yang selanjutnya menjadi Rp. 18.291.486.000,- di akhir tahun anggaran. Realisasi anggaran sebesar Rp.17.728.707.804,- atau 99,98% dari total pagu anggaran sebesar Rp.18.291.486.000,- dengan total anggaran terblokir (*Automatic Adjustment* dan blokir anggaran 524) yang masih menempel pada pagu anggaran sebesar Rp. 558.489.000,-.

EFEKTIVITAS KINERJA

Rasio efektivitas capaian kinerja diukur dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun berjalan dengan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 , maka pencapaian kinerja sasaran kegiatan termasuk ke dalam kategori efektif, sedangkan bila rasio yang dihasilkan adalah < 1 , menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran kegiatan kurang efektif. Hasil perhitungan terhadap efektivitas capaian kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Efektivitas Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	TA. 2023			TA. 2024			Efektivitas Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	1.000	1.000	100	4.500	4.500	100	1,00
2	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	30	30	100	100	100	100	1,00
3	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	20	20	100	50	50	100	1,00
Rata-Rata Efektivitas								1,00

Rasio efektivitas capaian kinerja untuk IKK 1, IKK 2 dan IKK 3 menunjukkan hasil > 1 atau dapat dikatakan pencapaian kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2024 telah efektif. Berdasarkan perhitungan Tabel 3.5. diketahui bahwa rata-rata efektivitas capaian kinerja Pusat Penyuluhan sebesar 1 yang artinya pencapaian kinerja telah dilakukan dengan efektif.

EFISIENSI KINERJA

Efisiensi Capaian Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara persentase penyerapan anggaran tahun 2024 dengan persentase capaian kinerja tahun 2024. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja, apabila rasio yang dihasilkan ≤ 1 maka pelaksanaan pencapaian kinerja termasuk dalam kategori efisien, sedangkan bila rasio yang dihasilkan > 1 maka pencapaian kinerja dikategorikan kurang efisien. Hasil perhitungan terhadap efisiensi capaian kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana Tabel 3.6. di bawah ini :

Tabel 3.6. Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024.

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		Efisiensi Capaian Kinerja
			Keuangan	Kinerja	
1	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	87,64	100	0,88
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)	86,06	100	0,86
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	91,61	100	0,92
Rata-Rata Efisiensi					0,97

Berdasarkan Tabel 3.7. rata-rata efisiensi capaian kinerja Pusat Penyuluhan memperoleh nilai 0,97. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

PROGRES CAPAIAN RENSTRA 2020-2024

Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata progres capaian Renstra Pusat Penyuluhan s.d Tahun 2024 sebesar 23,17%. Secara rinci progres capaian Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 3.7. berikut:

Tabel 3.7. Progres Capaian s.d. Tahun 2024 terhadap Renstra Tahun 2020-2024.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra 2020-2024	Capaian Renstra					Realisasi Capaian Renstra s.d. 2024	% Progress Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	32.000	460	1.288	1.700	1.000	4.500	8.948	27,96
2	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	1.500	100	65	90	30	100	385	25,67
3	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	950	10	38	50	20	50	168	17,68
Rata-rata Progres									23,77%

BENCHMARKING KINERJA

Benchmarking kinerja merupakan proses perbandingan kinerja antara dua atau lebih organisasi yang memiliki fungsi atau tujuan serupa, yang memungkinkan instansi untuk belajar dari praktik terbaik yang telah diterapkan oleh pihak lain serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Kegiatan benchmarking ini bertujuan untuk membandingkan kinerja kedua instansi guna memperoleh gambaran yang objektif mengenai pencapaian yang telah diraih, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah inovatif yang dapat diadopsi. Pada tanggal 13 November 2024, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan kegiatan benchmarking kinerja dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Badan P2SDM dan BPPSDMKP memiliki kesamaan dalam fungsi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, di mana keduanya berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis kementerian masing-masing melalui penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik, diharapkan kedua instansi dapat memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Beberapa poin penting yang diperoleh dari kegiatan benchmarking ini diantaranya :



Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai SAKIP, Pusat Penyuluhan melakukan benchmarking Kinerja dengan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK.

NILAI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Instansi	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Nilai SAKIP
Pusat Penyuluhan	26,39	25,48	13,24	18,00	83,11
Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	27,13	25,04	13,29	18,38	83,84
Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	26,64	25,93	13,35	18,89	83,81
Pusat Pengembangan Generasi LHK	26,89	25,34	13,39	18,91	84,53

Sedangkan pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pusat Penyuluhan sebagai bagian dari Kantor Pusat Badan PSDM melakukan benchmarking kinerja dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK dan Pusat Pengembangan Generasi LHK.

NILAI KINERJA KEUANGAN (NKA)

Instansi	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	100	97,67	98,84
Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	100	96,68	98,34
Pusat Pengembangan Generasi LHK	100	97,55	98,78

3.5. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA 1

Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) Pusat Penyuluhan BP2SDM pada akhir tahun 2024, jumlah Penyuluh Kehutanan PNS sebesar 2.676 orang yang terdiri dari 2.218 orang tersebar di 35 Pemerintah Daerah Provinsi dan sebanyak 458 orang tersebar di Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain itu juga terdapat Penyuluh Kehutanan PPPK sebesar 655 orang. Sedangkan jumlah Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 6.029 orang yang tersebar di 34 provinsi dan jumlah Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 883 orang yang berada di perusahaan pada sektor bidang kehutanan.

Pendampingan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan memerlukan sumberdaya manusia Penyuluh Kehutanan yang memiliki kompetensi di tingkat lapangan untuk dapat hadir di tengah masyarakat. Guna menyiapkan Penyuluh Kehutanan sebagai pendamping yang handal, diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat melalui penyelenggaraan temu teknis dan berbagai kegiatan pembinaan teknis terutama dalam hal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan/ *entrepreneurship* maupun pengembangan usaha kelompok yang didampingi.

Guna pencapaian target sesuai sasaran dan memenuhi kebutuhan pengetahuan yang dapat menjawab persoalan Kelompok Tani Hutan, Pusat Penyuluhan pada awal tahun telah melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas melalui survei identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan.

Pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal sebanyak 4.500 orang dilakukan dalam bentuk kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan ASN dan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) berdasarkan komoditas unggulan bidang kehutanan yang dilaksanakan secara onsite selama 4 hari. Kegiatan peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui webinar series dengan mengangkat tema Peraturan/Kebijakan dalam pembangunan LHK.



*Pelepasan Penyu pada Praktek Lapangan
Temu Teknis PK PNS Komoditas Wisata Alam*

Capaian realisasi sampai akhir tahun 2024 yaitu 4.500 orang penyuluh dan/atau pendamping dari target yang ditetapkan sebanyak 4.500 atau 100 % dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan ini dikarenakan kegiatan dilakukan secara online sehingga kegiatan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan dapat diikuti lebih banyak peserta. Disamping itu kegiatan juga dilakukan secara tatap muka atau offline. Adapun rincian pencapaian IKK Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal), secara lebih jelas sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Rincian Pencapaian Kinerja Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal).

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Webinar Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Perhutanan Sosial	21 Maret 2024	900 orang
2	Webinar Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	30 April 2024	1.486 orang
3	Webinar Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Lestari	16 Mei 2024	1.487 orang
4	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Komoditas HHBK	9 s.d. 11 Juli 2024	30 orang
5	Bimbingan Teknis Sekolah Lapangan Agroforestry Mangrove dan Pencegahan Karhutla	29 Juli s.d. 1 Agustus 2024	50 orang
6	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan ASN Komoditas Wisata Alam	2 s.d. 5 September 2024	35 orang
7	Webinar Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati serta Keseimbangan Ekosistemnya dalam upaya mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	17 Oktober 2024	512 orang
Jumlah			4.500 orang

Anggaran yang dialokasikan untuk IKK Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.747.985.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.746.170.589,- atau 99,93%.

Efisiensi capaian kinerja Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) termasuk dalam kategori efisien karena perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2024 memiliki rasio ≤ 1 . Demikian halnya dengan efektivitas kerjanya menunjukkan rasio 1 yang berarti kegiatan ini telah dilaksanakan secara efektif, dimana persentase capaian kinerja tahun 2023 sama dengan persentase capaian tahun 2024 yaitu 100% dari target.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian IKK Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal), pelaksanaan kegiatan Temu Teknis ini baik untuk Penyuluh Kehutanan Aparatur (PK PNS) maupun Penyuluh Kehutanan Non Aparatur (PKSM) memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan terutama dalam pengetahuan dan informasi teknologi terkait komoditas unggulan yang sedang diusahakan oleh kelompok tani. Kesesuaian materi Temu Teknis Berbasis Komoditas dengan kebutuhan peserta rata-rata 88,50 % peserta menyatakan sangat baik dan menyatakan baik dan 11,50 % peserta menyatakan cukup. Data ini menunjukkan bahwa kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta adalah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan Penyuluh Kehutanan saat ini.



Aris Munandar, PKSM
Narasumber pada Temu Teknis PKSM Komoditas Usaha HHBK

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dengan metode tatap muka secara langsung adalah materi pembelajaran yang sangat padat dan waktu praktek lapangan yang relatif singkat. Sedangkan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas secara virtual rata-rata peserta mengalami kendala sinyal jaringan di tempat kerja atau tempat tinggal kurang mendukung. Peserta banyak kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Peran dinas, CDK maupun KPH dan UPT KLHK dalam memberikan fasilitasi terhadap kegiatan Temu Teknis ini sangat diperlukan agar Penyuluh Kehutanan dapat mengikuti kegiatan Temu Teknis ini dengan lancar. Tetapi secara umum kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai yang sudah direncanakan.



*Praktek Lapangan
Temu Teknis PKSM Komoditas Usaha HHBK*

Selain kegiatan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan yang terkait langsung dengan capaian IKK, Pusat Penyuluhan juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan dengan output kegiatan di luar capaian IKK, antara lain :

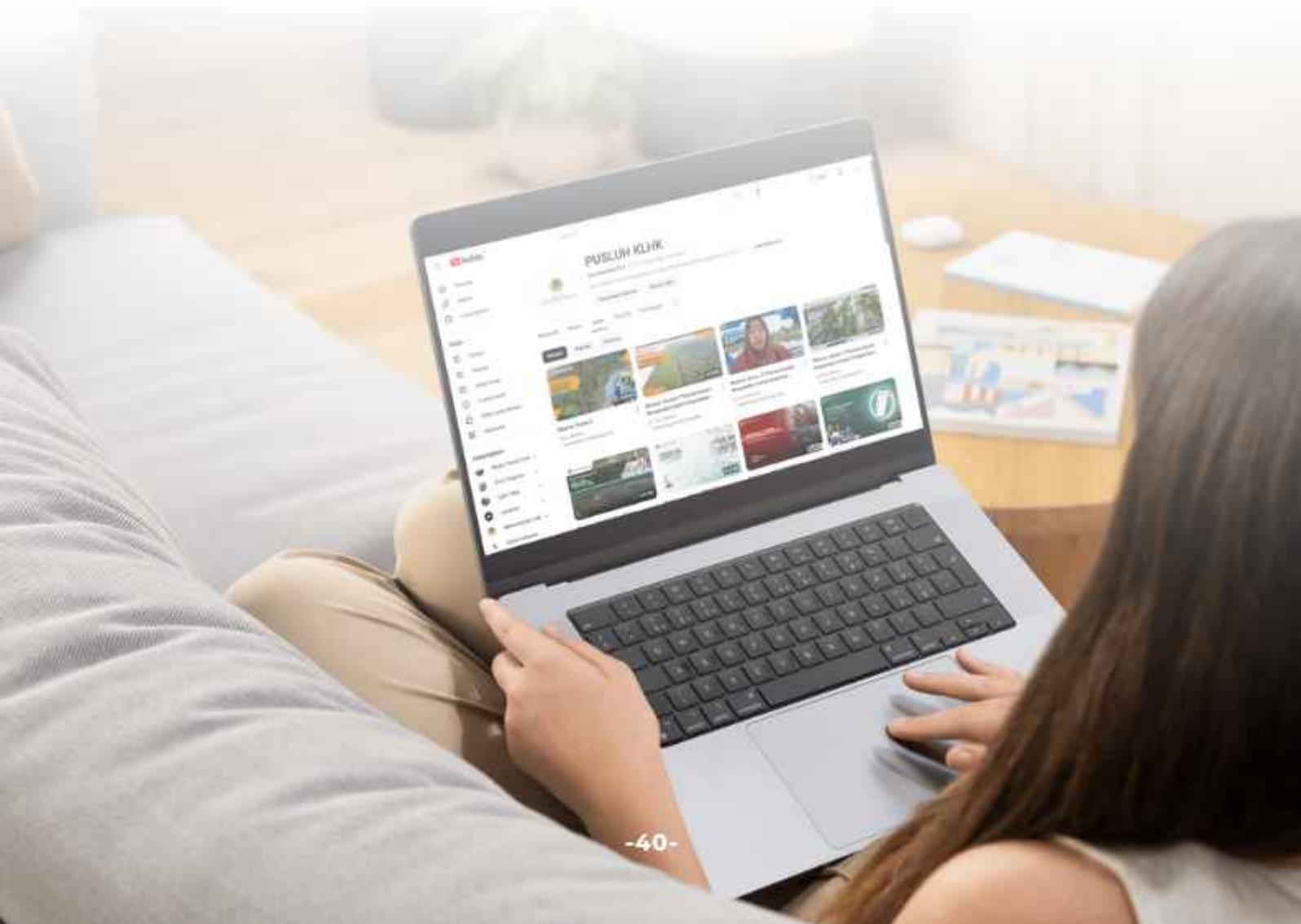
- **Penilaian dan Temu Karya Teladan Wana Lestari**, yaitu menetapkan perorangan, kelompok masyarakat dan aparat pemerintah yang telah berprestasi dalam pembangunan di bidang LHK melalui mekanisme penilaian berjenjang dari UPT-Provinsi-Nasional dengan kriteria yang telah ditentukan. Sebanyak 50 orang teladan yang terdiri dari 32 orang pemenang lomba dan 18 orang penerima apresiasi menerima penghargaan dari Menteri LHK Siti Nurbaya. Penyerahan penghargaan dilakukan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti pada tanggal 15 Agustus 2024. Lomba Wana Lestari diselenggarakan sebagai suatu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menilai prestasi perorangan, kelompok atau aparat pemerintah dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat di bidang LHK. Sedangkan Apresiasi Wana Lestari merupakan penilaian prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipasi dalam pelaksanaan tugas di bidang LHK.

” Temu Karya Teladan Wana Lestari dapat membangun silaturahmi dan solidaritas sesama teladan nasional, serta dapat menumbuhkan inspirasi untuk terus berkarya lebih baik lagi dalam mewujudkan kelestarian fungsi hutan dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Siti Nurbaya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



- **Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik.** Penyebarluasan informasi penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan melalui media cetak dilakukan dalam bentuk penyusunan katalog Forestamart dan poster. Sedangkan untuk media elektronik yaitu melalui media sosial Pusat Penyuluhan, website Pusat Penyuluhan dan aplikasi tematik, diantaranya SIMLUH, Cyber Extension, Forestamart, dan aplikasi Wana Lestari. Selain itu, pada tahun 2024 Pusat Penyuluhan juga melaksanakan kegiatan virtual yang meliputi Bimbingan Teknis Operasionalisasi Aplikasi SIMLUH bagi Penyuluh Kehutanan PNS, Bimbingan Teknis Operasionalisasi Aplikasi SIMLUH bagi Administrator Pusat, Bimbingan Teknis Penginputan Data Produk KTH Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur pada Aplikasi Forestamart Tahun 2024. Penyebarluasan Informasi secara elektronik juga dilakukan melalui Podcast Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Talkshow Pusat Penyuluhan yang dapat diakses pada kanal Youtube PUSLUH KLHK.





Salah satu metode penyuluhan yang telah dilakukan oleh Pusat Penyuluhan adalah diselenggarakannya Rapat Koordinasi Nasional Penyuluhan Kehutanan Tahun 2024 dengan Tema “Penguatan Kelembagaan dan Peran Penyuluhan Kehutanan dalam Mendukung Pembangunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan” pada tanggal 10 Desember 2024 di Gedung Manggala Wanabakti dihadiri oleh 230 orang yakni Pejabat Eselon I dan II lingkup Kementerian Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, Kepala UPT lingkup Kementerian Kehutanan, Koordinator PK Dinas Provinsi dan UPT Kementerian Kehutanan, Sekjen DPP IPKINDO serta Ketua Forum PKSM. Dalam kesempatan ini Bapak Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memberikan Penghargaan kepada Top 10 Provinsi dengan pencapaian NTE tertinggi.



- **Penerbitan Majalah Kenari.** Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media informasi bagi penyuluh kehutanan dalam melaksanakan penyuluhan di lapangan dengan tujuan memudahkan Penyuluh Kehutanan/Pendamping dalam mengakses bahan materi penyuluhan dan menyediakan sarana bagi Penyuluh Kehutanan untuk menuangkan ide/tulisan.



Success Story

PENDAMPINGAN KTH/MASYARAKAT OLEH PENYULUH KEHUTANAN PNS PASCA TEMU TEKNIS PK ASN KOMODITAS WISATA ALAM

Penyuluh Kehutanan dalam konteks pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran strategis dan diharapkan hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara dalam pembangunan daerah pinggiran.

Guna meningkatkan kemampuan Penyuluh Kehutanan dalam mendampingi kelompok tani hutan/masyarakat, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan Temu Teknis bagi Penyuluh Kehutanan ASN dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) serta Webinar Series I s.d V. Secara keseluruhan Webinar Series diikuti oleh 6.160 penyuluh kehutanan.



Temu Teknis bagi Penyuluh Kehutanan ASN komoditas Wisata Alam dilaksanakan di Semarang dan Karimun Jawa dan diikuti oleh 35 orang PK PNS dan PK PPPK yang berasal dari 10 provinsi. Kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan ASN yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran secara teori dan praktik kunjungan lapangan nyatanya sangat bermanfaat bagi para peserta dalam mendampingi kelompok binaannya.

Zainur, S.P.

merupakan salah satu peserta yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Zainur adalah Penyuluh Kehutanan Ahli Muda dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep Provinsi Jawa Timur dan telah bekerja sebagai penyuluh kehutanan selama 32 tahun 4 bulan dengan wilayah binaan terletak di pulau-pulau dan melakukan pembinaan di 84 kelompok binaan tersebar di 115 pulau. Zainur merupakan Terbaik I Teladan Wana Lestari Kategori Penyuluh Kehutanan PNS Tahun 2024.



Setelah mengikuti kegiatan Temu Teknis PK ASN Komoditas Wisata Alam, Zainur mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh pada KTH binaannya yakni, KTH Jambul Kuning. KTH Jambul Kuning binaan pak Zainur ini berlokasi di Pulau Wisata Jantung Nusantara, Desa Masakambing, Kecamatan Masalembu dengan ikon habitat burung kakak tua kecil jambul kuning.

Saat ini KTH Jambul Kuning saat ini sudah membangun homestay dengan memanfaatkan rumah anggota dan pengurus KTH yang tidak ditempati untuk para wisatawan luar pulau maupun mancanegara yang ingin melakukan pengamatan habitat Burung kakak tua kecil jambul kuning dan Zainur mendampingi kelompok dalam beberapa kegiatan, meliputi :

- Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) dari buah kelapa dat minyak goreng kelapa
- Budidaya Kepiting dengan pola Silvofishery di bawah tegakan hutan mangrove
- Pelestarian ekosistem hutan mangrove dengan pola tanam rumpun kejepit
- Pembuatan bibit mangrove secara swadaya
- Penanaman bibit produktif jenis kelengkeng



Homestay KTH Jambul Kuning



Pembuatan VCO



Pendampingan Kelompok Tani Hutan



Budidaya Kepiting Silvofishery

Success Story

PENDAMPINGAN KTH/MASYARAKAT OLEH PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT (PKSM) PASCA TEMU TEKNIS PKSM KOMODITAS HHBK TAHUN 2024

Penyuluh Kehutanan handal merupakan salah satu kunci keberhasilan pendampingan masyarakat di tingkat tapak. PKSM merupakan SDM potensial dalam melakukan pendampingan tersebut. Keberadaan PKSM dilapangan dapat dilihat kiprah dan keberhasilan usaha serta keahlian dalam berbagai komoditas. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh PKSM, perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan kelompok/masyarakat dampingan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas PKSM, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan temu teknis PKSM komoditas HHBK tahun 2024. Dengan adanya temu teknis, diharapkan PKSM menjadi *ecosociopreneur* yang dapat mengembangkan usahanya sekaligus mempunyai kepedulian terhadap kelestarian alam.



Temu Teknis PKSM komoditas HHBK dilaksanakan di Provinsi Lampung dan diikuti oleh 31 orang PKSM dari 8 provinsi di Indonesia. Temu Teknis PKSM Komoditas HHBK memberikan dampak yang positif bagi para pesertanya. Selain memperoleh materi berupa teori dan praktik, ada sharing pengalaman antar sesama PKSM. Hal ini sangat bermanfaat bagi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh PKSM.

Ali Mustofa

merupakan PKSM dari Kab. Rembang yang menjadi salah satu pesertanya. PKSM asal Kabupaten Rembang ini telah berkiprah luar biasa dalam pelestarian alam dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kab. Rembang. Ali Mustofa ditetapkan PKSM tahun 2012 oleh BP4K dan telah teregister pada Pusat Penyuluhan dengan Nomor Register PUSLUH BPSDM : 1378/33/17/2016. Jumlah KTH dampingan Ali Mustofa sebanyak 5 KTH. Ali Mustofa berhasil meraih Penghargaan Terbaik I Teladan Wana Lestari Kategori PKSM Tahun 2024.



Salah satu keunggulan dari Ali Mustofa adalah semangat yang tinggi mengikuti pelatihan/bimtek dan langsung menerapkan ilmunya. Materi dari temu teknis yang sudah diaplikasikan oleh Ali Mustofa bersama KTH binaannya diantaranya pemanfaatan limbah rumah tangga dengan sistem pengelolaan sampah organik menggunakan maggot. Dimana sebelumnya, pengelolaan sampah merupakan masalah yang cukup serius dalam pengelolaan wisata alam. Pengelolaan sampah yang sudah dijalankan oleh Ali Mustofa dan KTH binaan, dapat mengatasi masalah sampah dengan baik dan menambah pendapatan KTH dengan pemanfaatan maggot untuk berbagai kebutuhan (pakan ternak). Ali Mustofa juga mendampingi KTH membenahi/melengkapi administrasi KTH seperti buku keuangan, buku aset, dll.



Hasil dari sharing pengalaman antar PKSM pada temu teknis juga membuka wawasan Ali Mustofa untuk segera memperbaiki manajemen pengelolaan rintisan pengembangan wisata. Dengan manajemen yang terkelola dengan baik, maka potensi wisata yang ada dapat berkembang dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan KTH/masyarakat binaan.

Setelah temu teknis, Ali Mustofa juga memodifikasi dan melakukan uji coba pupuk organik dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar seperti limbah air kelapa, urin sapi, dan telur ayam yang tidak dierami. Pupuk organik ini akan digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman buah-buahan yang ditanam di sekitar Desa Punjulharjo.

INDIKATOR KINERJA 2

Jumlah KTH (KTH Mandiri)

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KTH (KTH Mandiri) merujuk pada banyaknya KTH yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) mempunyai klasifikasi yang terdiri dari kelas Pemula, kelas Madya dan kelas Utama. Klasifikasi KTH digunakan sebagai dasar pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian KTH.

KTH Mandiri yaitu KTH yang meningkat kelasnya dari kelas Madya menjadi Utama. KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Tujuannya agar KTH memiliki kelembagaan yang kuat, kawasan yang tertata dan lestari, serta usaha yang berkembang, sehingga kesejahteraan anggota meningkat dan berkelanjutan.

Pendampingan pengembangan KTH menuju KTH mandiri dilakukan secara berkelanjutan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penerbitan sertifikat KTH kelas utama. Salah satu target RPJM tahun 2020-2024 Pusat Penyuluhan BP2SDM adalah meningkatkan 500 unit kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi mandiri yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Untuk mewujudkan target KTH mandiri tersebut pada tahun 2024 Pusat Penyuluhan memfasilitasi kegiatan pengembangan KTH menuju KTH Mandiri yaitu dari kelas madya ke utama sebanyak 100 KTH yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Anggaran fasilitasi diprioritaskan untuk kelola kelembagaan melalui pendampingan pembuatan akta notaris KTH dan Kelola usaha melalui penambahan alat ekonomi produktif/diversifikasi produk KTH serta pengembangan usaha KTH. Adapun kelola kawasan diarahkan secara swadaya kelompok. Bagi Penyuluh Kehutanan pendamping, fasilitasi KTH Mandiri akan meningkatkan kemampuan Penyuluh Pendamping dalam membina kelompok.

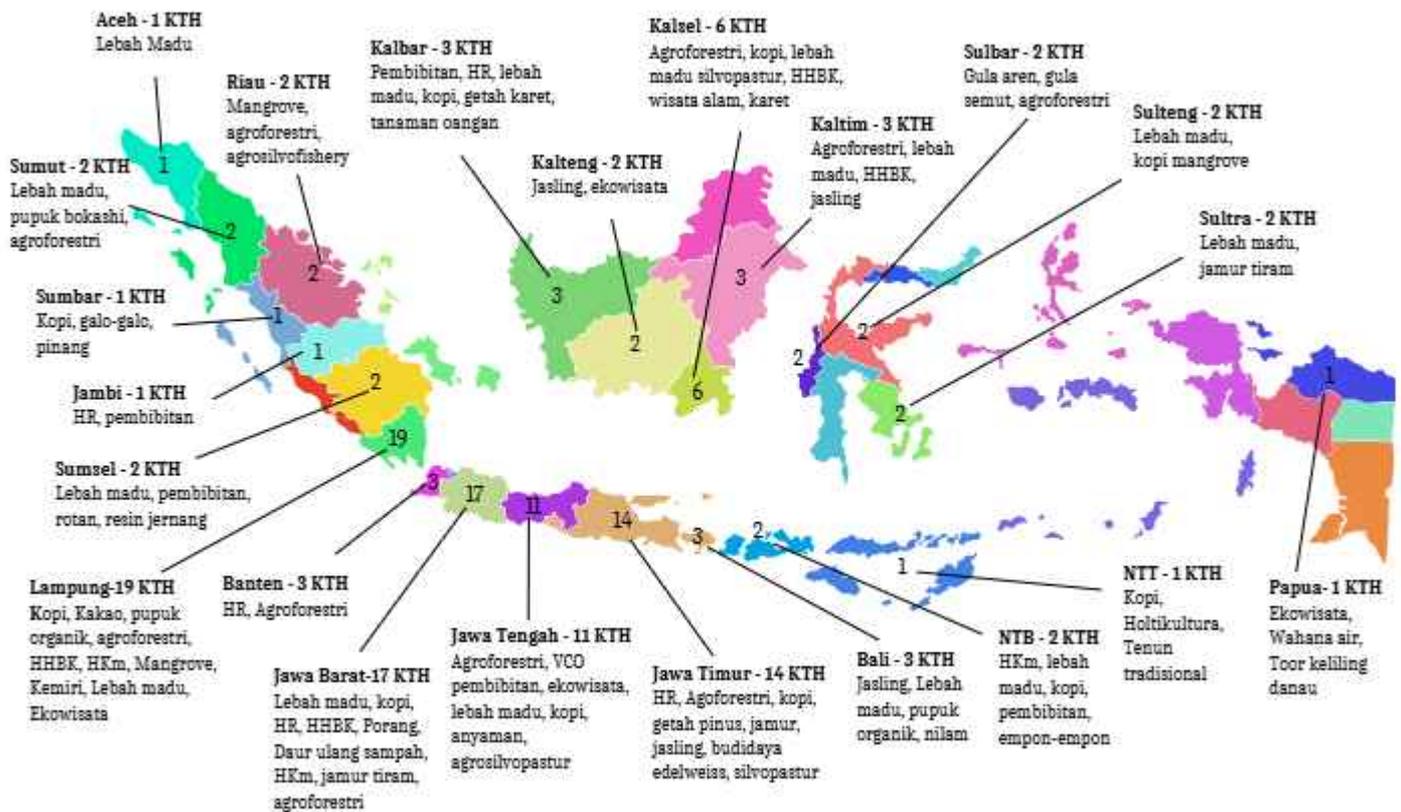


Pengisian Polibag bibit mangrove
KTH Sida Asih, Jawa Tengah

Mekanisme penyaluran dana Fasilitasi Kegiatan Pengembangan KTH menuju KTH mandiri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor : P.1/P2SDM/SET/KUM.1/3/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bantuan dana disalurkan melalui mekanisme Langsung (LS) kepada rekening kelompok setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan antara lain mempunyai rekening atas nama kelompok/KTH, menandatangani surat perjanjian kerjasama dan telah menandatangani kwitansi penerimaan dana. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh KTH dengan didampingi Penyuluh Kehutanan/pendamping.

Pada Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024, KTH Mandiri menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ke 2. Target IKK 2 yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu sebanyak 100 unit KTH Mandiri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 KTH dengan besaran bantuan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap KTH. Target tersebut telah tercapai 100% dimana 50 KTH telah difasilitasi menjadi KTH Mandiri hingga akhir tahun 2024. Berdasarkan realisasi anggaran, capaian IKK 2 yaitu 100% dari pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-. Sebanyak 50 KTH lainnya dicapai melalui swadaya (non fasilitasi) dengan intervensi fasilitasi kegiatan lain dari Pusat Penyuluhan dan intervensi dari Dinas Kehutanan Provinsi.

Efisiensi capaian kinerja Jumlah KTH (KTH Mandiri) termasuk dalam kategori efisien karena perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2024 memiliki rasio ≤ 1 . Demikian halnya dengan efektivitas kinerjanya menunjukkan rasio 1 yang berarti kegiatan ini telah dilaksanakan secara efektif, dimana persentase capaian kinerja tahun 2024 sama dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023.



Gambar 3.2. Jumlah Fasilitas KTH Mandiri pada Setiap Provinsi dan Komoditas yang Dikembangkan.

Fasilitas KTH Mandiri tahun 2024 ditetapkan melalui surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Nomor : SK. 01/PPK-2/04/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Penerima Fasilitas Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri Tahun 2024. Fasilitas ini diberikan kepada 50 KTH yang tersebar di 13 provinsi dengan berbagai komoditas yang diusahakan yaitu: Agroforestri, lebah madu, jamur tiram, ekowisata, hutan rakyat, persemaian, kopi, cuka kayu, gula aren, jasa lingkungan dan produk HHBK lainnya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitas pembentukan KTH Mandiri tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan di lapangan telah dilaksanakan dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan panduan yang telah disediakan. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan baik secara teknis maupun administrasi. Monitoring dilaksanakan secara online pada bulan Oktober dan November 2024. Monitoring yang dilakukan secara online terhadap 50 KTH penerima fasilitas KTH mandiri, menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Desember tahun 2024 sebanyak 50 KTH rata-rata telah melaksanakan kegiatan sebesar 100% dari keseluruhan kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fasilitas pembentukan KTH Mandiri antara lain :

- Pusat Penyuluhan telah berusaha menyampaikan surat pemberitahuan ke Dinas Kehutanan/LHK provinsi tentang kegiatan fasilitas pembentukan KTH Mandiri tahun 2024, namun respon sebagian daerah untuk menyampaikan usulan data KTH sesuai dengan yang dipersyaratkan membutuhkan waktu yang agak lama. Hal ini dikarenakan

KTH/Pendamping belum memahami kriteria KTH yang akan diusulkan, yang mengakibatkan tata waktu menjadi mundur. Sehingga Pusat Penyuluhan perlu proaktif berkomunikasi tentang usulan tersebut.

- Verifikasi terhadap calon penerima fasilitas KTH Mandiri tidak semua dilakukan secara langsung ke lapangan karena kondisi yang belum mendukung. Sehingga verifikasi yang dilakukan kepada sebagian KTH dilakukan hanya dengan melihat berkas administrasi.
- Pelaksanaan bimbingan teknis secara virtual/zoom meeting belum berjalan optimal karena terkendala oleh jaringan internet di sebagian daerah yang kurang bagus sehingga penyampaian materi bimbingan teknis kadang-kadang terganggu. Oleh karena itu diperlukan lagi konsultasi secara intensif antara KTH, Penyuluh Kehutanan Pendamping dan Pusat Penyuluhan. Diharapkan ke depannya bimbingan teknis dapat dilakukan secara langsung kepada KTH calon penerima fasilitas.
- Berkas yang disampaikan oleh KTH ke Pusat Penyuluhan sebagian belum sesuai persyaratan atau kurang lengkap sehingga perlu koordinasi dan perbaikan kembali yang membuat tata waktu yang telah direncanakan menjadi mundur.
- KTH Penerima fasilitas pembentukan KTH Mandiri sebagian berlokasi di wilayah pelosok sehingga sulit untuk komunikasi secara intensif.
- Pelaksanaan kegiatan fasilitas pembentukan KTH Mandiri sebagian terkendala sehingga tertunda, misalnya pengurusan ijin produk/PIRT karena diperlukan sosialisasi yang mengumpulkan banyak orang, lebah madu yang mengalami stress kemudian kabur karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan cocoknya kondisi wilayah setempat, pengurusan akta notaris yang memerlukan waktu yang cukup lama, dan lain-lain.
- Belum ada regenerasi pengurus di sebagian KTH sehingga pengurus dan anggota KTH yang sudah berusia lanjut mengalami kendala pada kegiatan yang memerlukan penguasaan teknologi misalnya pelaksanaan *zoom meeting*, penguasaan alat, pelaksanaan monitoring dengan metode online (*google drive dan power point*) dan lain-lain.



Success Story

KTH MANDIRI 2024

KTH SINDORO MAKMUR SEMAKIN BERKEMBANG DENGAN FASILITASI KTH MANDIRI

Kelompok Tani Hutan Sindoro Makmur merupakan salah satu kelompok tani berprestasi di wilayah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Merangkak dari bawah dan sampai saat ini masih berproses menjadi kelompok tani yang tangguh dan mandiri. Beberapa kegiatan kelola usaha yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Sindoro Makmur yaitu : Agroforestry, Budidaya Tembakau, sayuran, Kopi Arabika.

Pada Tahun 2024 mendapatkan fasilitasi pembentukan KTH mandiri dari Pusat Penyuluhan. Kegiatan KTH yang difasilitasi adalah Kelola Usaha berupa Café Rumah Kopi Anggrung dan penambahan tanaman Kopi Arabika berkualitas di lahan anggota kelompok tani. Pertama yaitu perluasan areal Kopi Arabika Konservasi sebanyak 2.000 batang. Kedua penambahan sarana usaha Café Rumah Kopi Anggrung untuk seduh secara manual (manual brew) yaitu Flair Espresso, Grinder Kopi Latina N600, Teko Listrik Brewista dan Vietnam Dripper. Selain itu juga Penambahan sarana pengemasan (packaging) produk berupa Band Sealer Heavy Pack.



Dengan difasilitasi, KTH Sindoro Makmur semakin maju dan berkembang ke arah yang lebih mandiri dan yang paling utama adalah peningkatan pendapatan dari usaha yang dikelolanya. Perkembangannya yang signifikan adalah :

- 1** Perluasan areal tanaman Kopi Arabika, ada penambahan 4,5 Ha tanaman baru dari bibit berkualitas. Penanaman Kopi Arabika dari bibit yang berkualitas ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas (cita rasa) kopi.
- 2** Dengan adanya bantuan alat penyeduhan (manual brew) yang bisa memenuhi permintaan pelanggan, Rumah Kopi di Anggrung pengunjungnya lebih ramai. Dari omset rata –rata bulannya Rp. 6 juta menjadi Rp. 8 juta per bulan.
- 3** Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kopi Arabika olahan secara keseluruhan (penjualan di Rumah Kopi Anggrung dan e-commers/ Online shop) juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 NTE sebesar Rp. 358.500.000,- di Tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 382.000.000,-
- 4** Rumah Kopi Anggrung sekaligus sebagai Sekretariat Kelompok Tani Sindoro Makmur menjadi tempat yang direkomendasikan untuk Pelatihan, Studi Banding, Acara-acara pertemuan/ Sosialisasi yang dapat dipergunakan oleh dinas/ instansi ataupun kalangan umum.
- 5** Komoditas KTH yaitu tanaman kopi bukan hanya bermanfaat buat lingkungan tapi juga menambah penghasilan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan 34 anggota kelompok.



6 Dusun Anggrunggondok di lereng Gunung Sindoro, Kopi Arabika ditanam di ketinggian 1.300-1.600 mdpl, kopi biasa ditanam di antara Tembakau. Sebagian memakai sistem tumpang sari, antara Tembakau, Kopi Arabika dan sayuran. Kopi juga mengisi batas tanah dan penguat teras/galengan. Karena sifatnya higroskopis, Kopi Arabika di daerah ini lantasi beraroma tembakau. Ini jadi ciri khas kopi Arabika Jawa Sindoro-Sumbing. Ciri ini sudah dikenal hingga ke luar negeri. KTH Sindoro Makmur bersama tokoh masyarakat berupaya melindungi dengan mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh hak paten dan mendapat pengesahan pada 1 Desember 2014 : Indikasi Geografis Kopi Java Arabika Sindoro-Sumbing.

7 KTH Sindoro Makmur menjadi KTH kelas utama

Semoga setelah mendapatkan fasilitasi pembentukan KTH Mandiri kedepannya KTH dapat lebih meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelompok dalam mengelola usaha sehingga menjadi produktif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.

INDIKATOR KINERJA 3

Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan

Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) atau Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan pemagangan bagi masyarakat lainnya. Hadirnya Wanawiyata Widyakarya menjadi suatu jawaban sekaligus tantangan peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak sebagai pelaku utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mengelola usahanya sehingga mereka mampu, berdaya dan mandiri.

Pada Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024, Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang terbentuk dan dikembangkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ke 3. Target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu 50 unit KTH yang terdiri dari pembentukan 30 unit KTH menjadi LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya dan pengembangan 20 unit KTH menjadi LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya. Target tersebut telah tercapai 100% dimana terdapat total 50 unit KTH telah difasilitasi pembentukan dan pengembangan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya hingga akhir tahun 2024. Berdasarkan realisasi anggaran, capaian yaitu 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,-.



Pada capaian kinerja Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang terbentuk dan dikembangkan termasuk dalam kategori efisien karena perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2023 memiliki rasio ≤ 1 . Demikian halnya dengan efektivitas kerjanya menunjukkan rasio 1 yang berarti kegiatan ini telah dilaksanakan secara efektif, dimana persentase capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2023.

PEMBENTUKAN

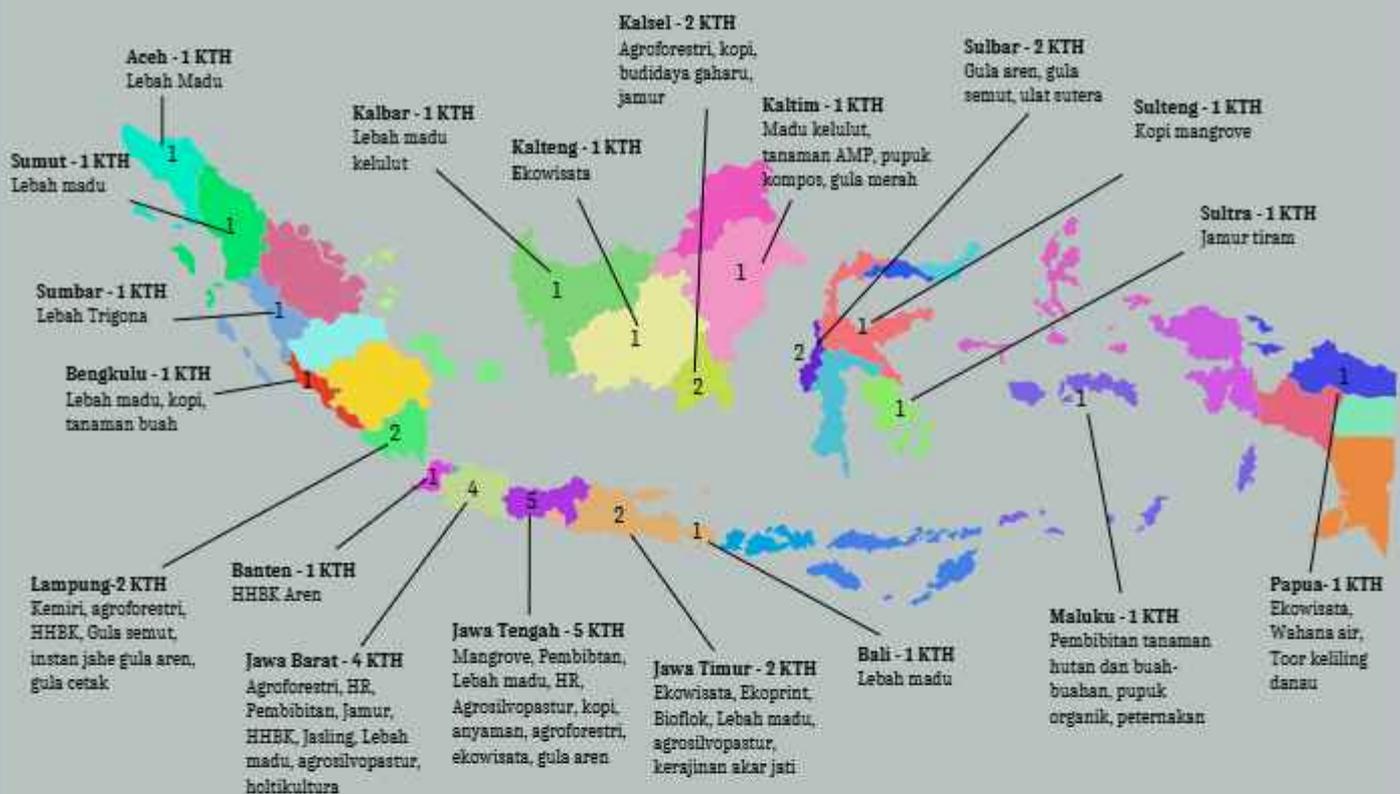
Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) atau Wanawiyata Widyakarya

Fasilitasi pembentukan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memiliki kegiatan usaha produktif bidang kehutanan dan lingkungan hidup dan memiliki potensi untuk dapat memberikan pelatihan dan pemagangan usaha produktif yang dilakukannya kepada masyarakat atau KTH lainnya. Calon KTH yang akan difasilitasi memiliki SDM yang mampu menjadi fasilitator atau narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman usahanya serta memiliki sarana prasarana penunjang sebagai tempat pembelajaran. Pengalaman KTH sebagai lokasi studi banding maupun pelatihan bagi masyarakat menjadi nilai lebih untuk dapat menerima fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya.

Pada tahun 2024 target pembentukan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya dilakukan terhadap 30 KTH yang telah ditetapkan menjadi LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya. Target tersebut tercapai 100% dengan dilaksanakannya pembentukan terhadap 30 Wanawiyata Widyakarya yang tersebar di 19 Provinsi. Provinsi penerima fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua. Fasilitasi pembentukan wanawiyata widyakarya ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Nomor: SK.02/PPK-2/04/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Penerima Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2024.

Output pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2024 yaitu terbentuknya unit - unit percontohan usaha dibidang kehutanan dan ataupun lingkungan hidup yang bisa dijadikan sebagai tempat pelatihan dan pemagangan bagi masyarakat luas. Sedangkan outcomenya yaitu meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui pemagangan dalam mengembangkan usaha dibidang kehutanan dan ataupun lingkungan hidup dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat yang produktif dan mandiri dibidang kehutanan dan ataupun lingkungan hidup. Pagu anggaran belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah sebesar Rp 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) telah terealisasi sebesar 100%.

Berdasarkan hasil laporan kegiatan dan hasil monitoring kelompok penerima kegiatan Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2024 yang telah dilaporkan, secara umum hasil yang dicapai telah sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat pada tahap perencanaan kegiatan sebelumnya. Realisasi fisik dan keuangan masing – masing kelompok yang dilaksanakan melalui 1 (satu) tahap pembayaran dengan dana sebesar Rp. 25.000.000 secara keseluruhan mencapai 100 %. Adapun alokasi dana yang digunakan oleh penerima fasilitasi meliputi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelatihan, sarana dan prasarana pendukung pelatihan dan pemagangan, serta pengembangan usaha telah dilaksanakan oleh masing – masing wanawiyata widyakarya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.



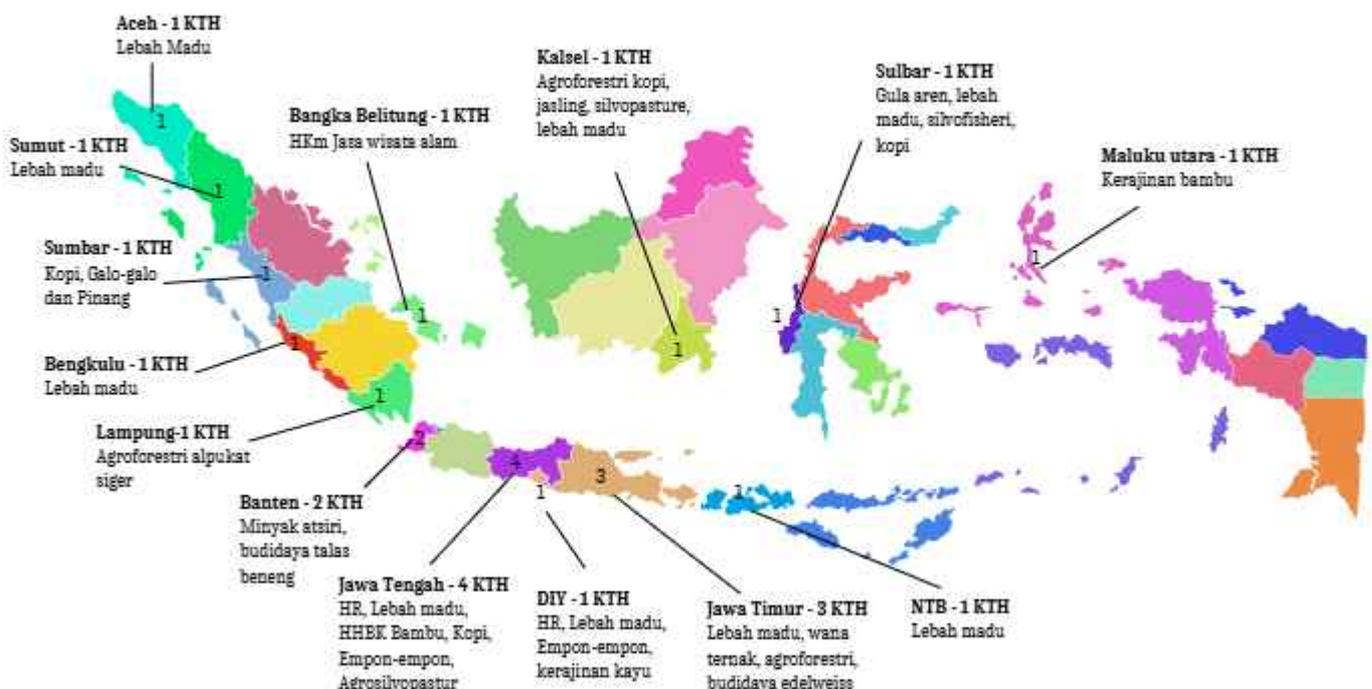
Gambar 3.3. KTH penerima fasilitasi pembentukan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya beserta komoditas yang diusahakannya.

PENGEMBANGAN

Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) atau Wanawiyata Widyakarya

Pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya dilakukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya yang telah ditetapkan agar menjadi lembaga pelatihan dan pemagangan yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dengan menerapkan program pelatihan yang berbasis kompetensi, memiliki sarana dan prasarana yang terstandar, serta memiliki fasilitator atau instruktur yang kompeten. Kriteria penerima fasilitasi pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya adalah telah ditetapkan sebagai wanawiyata widyakarya dan memiliki komoditas usaha atau rencana pengembangan usaha berdasarkan prioritas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau kebijakan lain prioritas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengembangan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya meliputi kegiatan pengembangan usaha, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelatihan dan pemagangan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola Wanawiyata Widyakarya.

Pada tahun 2024 target pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya dilakukan terhadap 20 KTH yang telah ditetapkan menjadi LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya. Target tersebut tercapai 100% dengan dilaksanakannya pengembangan terhadap 20 Wanawiyata Widyakarya yang tersebar di 14 Provinsi. Provinsi penerima fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Fasilitasi pengembangan wanawiyata widyakarya ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Nomor: SK.03/PPK-2/04/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Penerima Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2024.



Gambar 3.4. KTH penerima fasilitasi pengembangann LP2UKS/Wanawiyata beserta komoditas yang diusahakannya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2024, lebih difokuskan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian target kegiatan fasilitasi sesuai dengan rencana dan tata waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu :

- Penelitian/verifikasi berkas dengan menelusuri dokumen yang berhubungan dengan kegiatan fasilitasi seperti : proposal, perjanjian kerjasama, rencana usulan kegiatan dan rencana anggaran biaya serta dokumen pendukung lainnya.
- Kunjungan lapangan (sample ke lokasi kegiatan fasilitasi) untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dilapangan dengan rencana dan biaya yang telah dianggarkan, serta tata waktunya.
- Pertemuan online melalui aplikasi zoom clouds meeting dengan semua ketua dan penyuluh pendamping Wanawiyata Widyakarya penerima fasilitasi.

Output pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2024 yaitu :

- 1.Terlaksananya penyaluran bantuan Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya tahun 2024 yang diberikan kepada Wanawiyata Widyakarya yang telah ditetapkan.
- 2.Terlaksananya kegiatan pengembangan Wanawiyata Widyakarya untuk mewujudkan lembaga pelatihan dan pemagangan, yang memiliki manajemen yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal, dengan menerapkan program pelatihan dan memiliki sarana prasarana yang terstandar, serta memiliki fasilitator atau instruktur yang kompeten.

Pagu anggaran belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah sebesar Rp.400.000.000 telah terealisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring dan pelaporan Wanawiyata Widyakarya penerima Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2024, secara umum hasil yang dicapai telah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah dibuat pada tahap perencanaan kegiatan sebelumnya. Realisasi fisik dan keuangan masing - masing kelompok yang dilaksanakan melalui 1 (satu) tahap pembayaran dengan dana sebesar Rp. 20.000.000 secara keseluruhan mencapai 100%. Dana fasilitasi digunakan oleh penerima fasilitasi untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelatihan dan pemagangan, peningkatan kapasitas SDM Wanawiyata Widyakarya serta pendukung kegiatan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2024 yang telah dilaksanakan, ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan serta tantangan, selama kegiatan berlangsung yaitu sebagai berikut :

- Sebagian besar SDM Wanawiyata Widyakarya dan penyuluh kehutanan pendamping, kurang berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi, terutama pada sisi pertanggung jawaban administrasi kegiatan;
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2024, sebagian besar dilakukan secara online melalui aplikasi zoom clouds meeting, sehingga hasil kegiatan fasilitasi yang disampaikan belum menggambarkan kondisi riil dilapangan;
- Keberadaan Wanawiyata Widyakarya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat, belum begitu dikenal, baik oleh masyarakat umum itu sendiri maupun oleh instansi pemerintah lainnya;
- Masyarakat umum belum begitu tertarik untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pemagangan di lembaga Wanawiyata Widyakarya, dikarenakan masyarakat lebih cenderung belajar lewat aplikasi media social seperti youtube dll;
- Dukungan dari berbagai stakeholder, khususnya instansi pembina masih cukup rendah baik dari sisi pembinaan, pemenuhan sarana dan prasarana serta publikasi dan promosi terhadap keberadaan Wanawiyata Widyakarya.



Success Story

LP2UKS YANG DIBENTUK DAN DIKEMBANGKAN

WANAWIYATA WIDYAKARYA SADAR TANI MUDA TEMPAT MAGANG AGAR MASYARAKAT BERDAYA

Kelompok Tani Hutan Sadar Tani Muda merupakan salah satu kelompok tani hutan berprestasi yang beralamatkan di Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jenis kegiatan/ usaha yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Sadar Tani Muda yaitu : Jasa Lingkungan, Agroforestry, Peternakan Kambing dan domba (300 ekor), Kambing Perah, Budidaya Canar, dan Budidaya Lebah Madu (3000 stup). KTH Sadar Tani Muda telah diregistrasi dengan nomor 32/01/24/2010/KTH.763/2019 dan telah terdaftar dalam aplikasi SIMLUH. KTH Sadar Tani Muda dibentuk pada tanggal 24 April 2019 dengan SK Kepala Desa Bojong Murni dan sudah mendapatkan akta notaris/Menkumham pada tanggal 15 Agustus 2023. KTH Sadar Tani Muda juga sudah mendapatkan Sertifikat Utama dengan skor kemampuan KTH 930. KTH Sadar Tani Muda diketuai oleh Iyan Supriadi dan didampingi oleh penyuluh kehutanan pendamping Nurul Fadhilah Amiruddin, SP dengan total jumlah anggota 25 orang. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH Sadar Tani Muda pada tahun 2024 mencapai Rp 470.965.000,-



Pada Tahun 2024 KTH Sadar Tani Muda mendapatkan fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya dari Pusat Penyuluhan. KTH Sadar Tani Muda ditetapkan menjadi Wanawiyata Widyakarya melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 6480 Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 61/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Wanawiyata Widyakarya, Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. KTH Sadar Tani Muda dalam kegiatan sehari – hari fokus pada pengembangan SDM dan keinginan untuk mengedukasi anggota maupun masyarakat mengenai pentingnya mengelola lingkungan dengan tetap mendapatkan nilai manfaat ekonomi. Oleh karenanya, KTH Sadar Tani Muda sering dijadikan tempat untuk pelatihan maupun pemagangan oleh beberapa organisasi dan instansi baik di sekitar JABODETABEK hingga di Provinsi lain terkait unit usaha dan cara mengelolanya. KTH Sadar Tani Muda berisikan pemuda pemudi Desa Bojong Murni yang di dalamnya telah memiliki anggota yang mampu menjadi narasumber dalam kegiatan – kegiatan pelatihan, kunjungan bahkan pemagangan.

KTH Sadar Tani Muda memiliki beberapa mitra untuk permodalan, pemasaran, inovasi produk dan pemagangan. Mitra-mitra tersebut antara lain Yayasan Syahrul Qurán, Madu Hafa, Saung Nata Buana, Fakultas Ilmu Pangan Halal, Universitas Djuanda, Sabila Farm dan Ayub Farm. Pengalaman kunjungan untuk berlatih dan belajar juga sudah banyak antara lain yaitu dari Yayasan Al Hafiz, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, PT. Darma Karya, DKM Maskid sedesa Buaran Serpong, Sekolah Vokasi IPB, Universitas Djaunda, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pakuan dan Yayasan Gugah Nurani Indonesia.



Dengan adanya fasilitasi pembentukan wanawiyata widyakarya, KTH Sadar Tani Muda semakin layak dan nyaman menjadi tempat belajar dan magang untuk masyarakat. Hasil perkembangan dengan adanya fasilitasi antara lain :

1. Pelatihan pengelola wanawiyata widyakarya (keuangan, manajemen, teknis, penyusunan matriks materi) sehingga anggota sudah mendapatkan ilmu dalam pengelolaan wanawiyata widyakarya.
2. Dengan adanya pemenuhan sarana dan prasarana dasar pelatihan dan pemagangan berupa papan nama wanawiyata widyakarya berfungsi sebagai informasi dan identitas KTH Sadar Tani Muda merupakan Wanawiyata Widyakarya, tempat berlatih dan magang bagi masyarakat.
3. Pembangunan pondok pertemuan yang berfungsi sebagai tempat berlatih dan magang.
4. Pengadaan sarana prasarana pendukung laptop sebagai media pembelajaran.
5. Pembelian indukan kambing perah betina dan mesin cup sealer CPS-959 untuk pengembangan usaha.

Harapannya setelah mendapatkan fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya, kedepannya Wanawiyata Widyakarya Sadar Tani Muda dapat lebih maju dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menjadi percontohan, tempat pelatihan dan magang agar masyarakat berdaya.



WANAWIYATA WIDYAKARYA FITORAJO BEE FARM

Wanawiyata Widyakarya Fitorajo Bee Farm terletak di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara. Wanawiyata Widyakarya Fitorajo Bee Farm merupakan lembaga yang konsen dalam memberikan pelatihan budidaya lebah madu kepada masyarakat Labuhanbatu Selatan pada khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Pada tahun 2023 Wanawiyata Widyakarya Fitorajo Bee Farm ditetapkan sebagai Wanawiyata Widyakarya melalui SK Menteri LHK Nomor SK 4954/MenLHK-P2SDM/LUH/DIK.3/5/2023.

Pada tahun 2024 Wanawiyata Widyakarya Fitorajo Bee Farm mendapatkan fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya dari Pusat Penyuluhan. Dana fasilitasi digunakan untuk peningkatan fasilitas peralatan praktek/demplot (mesin panen madu trigona dan pembuatan rak penyimpanan), peningkatan fasilitas pondok belajar (pembuatan lantai semen, renovasi dan penggantian plank merk) dan peningkatan materi pendukung pelatihan dan pemagangan (modul pembelajaran budidaya lebah madu, penyusunan paket pelatihan dan brosur promosi).

Dengan mendapatkan fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya, Fitorajo Bee Farm mempunyai paket pelatihan dan brosur promosi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Untuk promosi Wanawiyata Widyakarya Fitorajo Bee Farm membuat brosur paket sukses budidaya lebah madu. Paket pelatihan yang ditawarkan diantaranya adalah bee keeping class, bee keeping & farming class, bee keeping & building class. Melalui fasilitasi yang diberikan oleh Pusat Penyuluhan, sarana prasarana di Wanawiyata Widyakarya Fitorajo Bee Farm semakin lengkap dan Wanawiyata Widyakarya Fitorajo Bee Farm semakin siap menerima peserta pelatihan/magang komoditas budidaya lebah madu.



Success Story

KTH PERAIH NTE TERTINGGI TAHUN 2024

PENYULUH KEHUTANAN SUKSES MENDAMPINGI KTH WONO LESTARI

KTH Wonolestari terbentuk pada tahun 2006 dengan Akte Notaris No.5/2006 dan Nomor Register KTH pada Pusat Penyuluhan :35/08/12/2005/KTH.075/2010 dengan luas areal kelola KHDP 940 ha. Saat ini KTH Wonolestari sudah menjadi KTH kelas utama. Komoditas usaha KTH Wonolestari sangat beragam diantaranya susu sapi, rumput pakan ternak, pisang mas kirana, kambing etawa, wisata air terjun Watusilo, dan produk olahan pangan.

Komoditas - komoditas usaha KTH yang sudah diinput ke dalam aplikasi SIMLUH sebagai Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) adalah susu sapi dan hijauan makan ternak (HMT)

Jumlah sapi perah yang dimiliki oleh anggota KTH Wonolestari sebanyak 1250 ekor, dengan 750 ekor yang memproduksi susu sebanyak 10 liter/ekor. Harga susu sapi Rp. 7500,-. Omzet yang dapat dicapai dari usaha susu sapi sebesar $(750 \text{ ekor} \times 10 \text{ lt} \times 30 \text{ hari}) \times \text{Rp. } 7.500,- = \text{Rp. } 1.687.500.000,-/\text{bulan}$. Untuk omzet 1 tahun sebesar $\text{Rp. } 1.687.500.000,- \times 12 \text{ bulan} = 20.250.000.000,-/\text{tahun}$

Untuk HMT ada rumput gajah/ odot dan kaliandra. Luasan areal rumput gajah/odot 260 ha, dan kaliandra 385 ha. Kebutuhan pakan hijau untuk sapi 2 ikat/hari dengan harga Rp. 20.000,-/ikat. Kebutuhan HMT untuk 1.250 ekor sapi sebanyak $2 \text{ ikat} \times 1.250 = 2.500 \text{ ikat}$. Omzet yang dapat dicapai dari penjualan HMT = $(2.500 \text{ ikat} \times \text{Rp. } 20.000,-) \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 1.500.000.000,-/\text{bulan}$. Sedangkan omzet 1 tahun sebesar $\text{Rp. } 1.500.000.000,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.000.000.000,-/\text{tahun}$

NTE KTH Wonolestari

Rp 33.793.200.000

Data SIMLUH per 31 Desember 2024

KOLABORASI PENYULUH KEHUTANAN PNS DAN PKSM DI KAB. LUMAJANG DALAM PENDAMPINGAN KTH/MASYARAKAT

Penyuluh Kehutanan merupakan ujung tombak pembangunan kehutanan di tingkat tapak. Untuk mencapai keberhasilan dalam pendampingan KTH/masyarakat diperlukan kolaborasi antara Penyuluh Kehutanan ASN dan PKSM.

Suprpto merupakan Penyuluh Kehutanan PNS yang bertugas di CDK Wilayah Lumajang sejak 6 tahun lalu. Dedikasi Suprpto sudah tidak diragukan lagi. Wilayah kerjanya mencakup 2 kecamatan yaitu Senduro dan Pasrujambe. Saat ini KTH binaan yang aktif didampingi mencapai 20 KTH dan salah satunya adalah KTH Wonolestari.



Edi Santoso/Edi Burno
PKSM/Ketua KTH Wonolestari



Suprpto, SP, MMA
Penyuluh Kehutanan PNS
CDK Wilayah Lumajang

Suprpto mempunyai kiat-kiat sukses dalam pendampingan KTH/masyarakat di wilayah kerjanya yaitu :

- ✔️ Penyuluh Kehutanan harus memperkaya informasi terkait regulasi/kebijakan terbaru dan rajin mensosialisasikan kepada KTH binaan.
- ✔️ Menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah (Kab/Kota dan provinsi) sebagai pengampu wilayah terkait pengelolaan kawasan.
- ✔️ Melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan pembangunan kehutanan di tingkat tapak di wilayah kerja, sehingga setiap daerah memiliki ciri khas tertentu dari komoditi usaha unggulannya.
- ✔️ Melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah kerja secara kontinyu dan persuasif sehingga tercipta hubungan baik.
- ✔️ Melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah kerja secara kontinyu dan persuasif sehingga tercipta hubungan baik.
- ✔️ Melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah kerja secara kontinyu dan persuasif sehingga tercipta hubungan baik.
- ✔️ Pengembangan digitalisasi untuk pemasaran usaha kelompok di tingkat daerah, nasional, dan internasional.



Edi Santoso atau dikenal Edi Burno telah melakukan pendampingan KTH/Masyarakat sejak tahun 2005. Edi bercita-cita untuk mengubah pola pikir masyarakat yang semula merambah hutan menjadi pelestari hutan. Kiat-kiat sukses edi dalam merubah pola pikir dan pemberdayaan masyarakat di Desa Burno dan sekitarnya adalah :

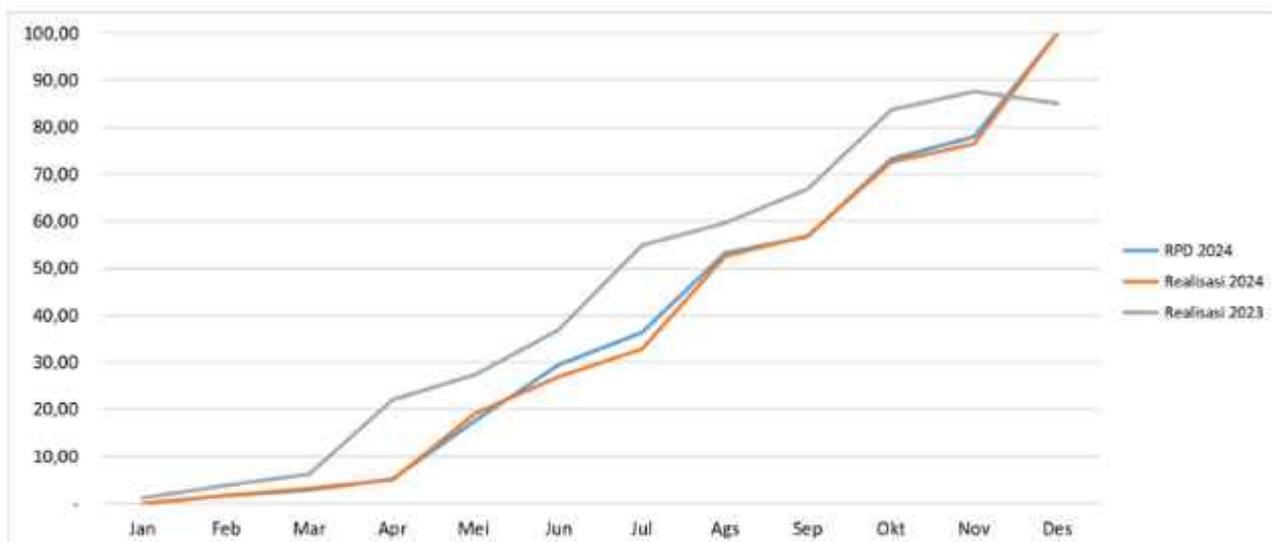
- ✔️ Kerja ikhlas, kerja keras, dan kerja tuntas, jujur, diniatkan ibadah dan bermanfaat bagi semua orang.
- ✔️ Memanfaatkan potensi SDA dengan sebaik mungkin.
- ✔️ Pengelolaan SDM dalam perubahan pola pikir dengan kesabaran, keuletan, dan ketokohan (sangat efektif) sehingga mempunyai visi misi yang sama.
- ✔️ Menyusun strategi dalam pemberdayaan masyarakat berupa program kerja yang tercantum dalam AD/ART KTH yang menciptakan alam lestari dan kesejahteraan masyarakat meningkat.



3.6. REALISASI ANGGARAN

TREN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

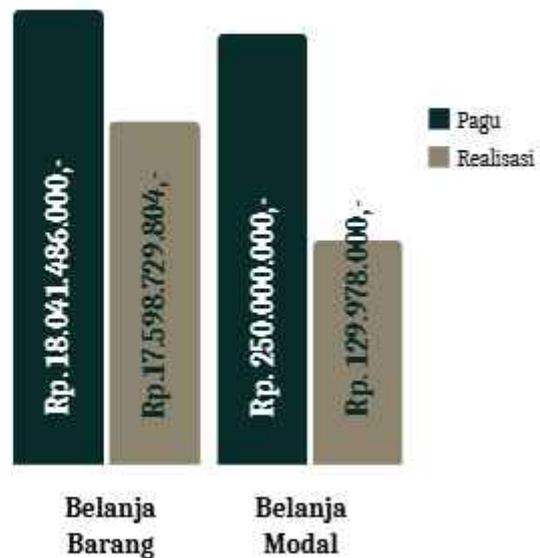
Berdasarkan aplikasi OMSPAN (perekaman tanggal 10 Januari 2024), pada Tahun 2024 Pusat Penyuluhan dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 17.728.707.804,- atau 99,98% dari total pagu anggaran sebesar Rp.18.291.486.000,- dengan total anggaran terblokir (*Automatic Adjustment* dan blokir anggaran 524) yang masih menempel pada pagu anggaran sebesar Rp. 558.489.000,-. Persentase realisasi anggaran Pusat Penyuluhan pada tahun 2024 memenuhi prognosis yang telah direncanakan, yakni 99,98%, konsisten tetap sama dengan persentase realisasi anggaran tahun sebelumnya. Tren realisasi keuangan terhadap Rencana Penarikan Dana Pusat Penyuluhan Tahun 2023 sebagaimana Gambar 3.5. sebagai berikut :



Gambar 3.5. Perbandingan Tren Realisasi Anggaran Tahun 2023-2024

REALISASI PER JENIS BELANJA

Proporsi anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja yaitu belanja barang sebesar Rp. 18.041.486.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 250.000.000,-. Hingga bulan Desember 2023, serapan anggaran belanja barang sebesar 99,98% dan belanja modal 99,98% dengan dengan total anggaran terblokir (*Automatic Adjustment* dan blokir anggaran 524) yang masih menempel pada pagu anggaran sebesar Rp. 558.489.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Penyuluhan dapat merealisasikan seluruh anggaran secara optimal pada setiap jenis belanja. Realisasi belanja barang dan belanja modal Pusat Penyuluhan dapat dijelaskan sebagaimana Gambar 3.6. berikut.



Gambar 3.6. Realisasi belanja barang dan belanja modal Pusat Penyuluhan

REALISASI PER RINCIAN OUTPUT

Realisasi anggaran Pusat Penyuluhan per rincian output dapat dilihat secara rinci sebagaimana Tabel 3.9. berikut ini. Pagu anggaran Pusat Penyuluhan yang tertulis di dalam DIPA Satker Kantor Pusat BP2SDM adalah Rp. 18.291.486.000,- dengan dengan total anggaran terblokir (*Automatic Adjustment* dan blokir anggaran 524) yang masih menempel pada pagu anggaran sebesar Rp. 558.489.000,-.

Tabel 3.9. Realisasi anggaran per rincian output.

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping handal	2.114.221.000	2.113.392.731	99,96
KTH Mandiri	1.483.090.000	1.482.759.776	99,98
Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	1.471.377.000	1.471.230.051	99,99
Layanan BMN	2.600.000	2.597.000	99,88
Layanan Umum	10.901.670.000	10.899.081.253	99,98
Layanan Perkantoran	1.630.039.000	1.629.668.993	99,98
Layanan Sarana Internal	130.000.000	129.978.000	99,98
Total	17.732.997.000	17.728.707.804	99,98

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kesesuaian perencanaan kinerja anggaran yang disebut dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dan pelaksanaan kinerja anggaran yang disebut Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Kedua indikator tersebut masing-masing memberi sumbangsih sebesar 50% dalam NKA. Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai rencana, menghasilkan output yang diharapkan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Sampai dengan Bulan Desember 2023, Pusat Penyuluhan yang merupakan Sub Satker pada Kantor Pusat Badan P2SDM memperoleh NKA sebesar 98,84.

Nilai Kinerja Anggaran merupakan Indikator kinerja yang baru diterapkan pada tahun 2024 untuk seluruh unit kerja maupun satuan kerja di lingkup KLHK sesuai dengan arahan dari Biro Perencanaan sehingga Indikator tersebut pada saat ini hanya tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA)

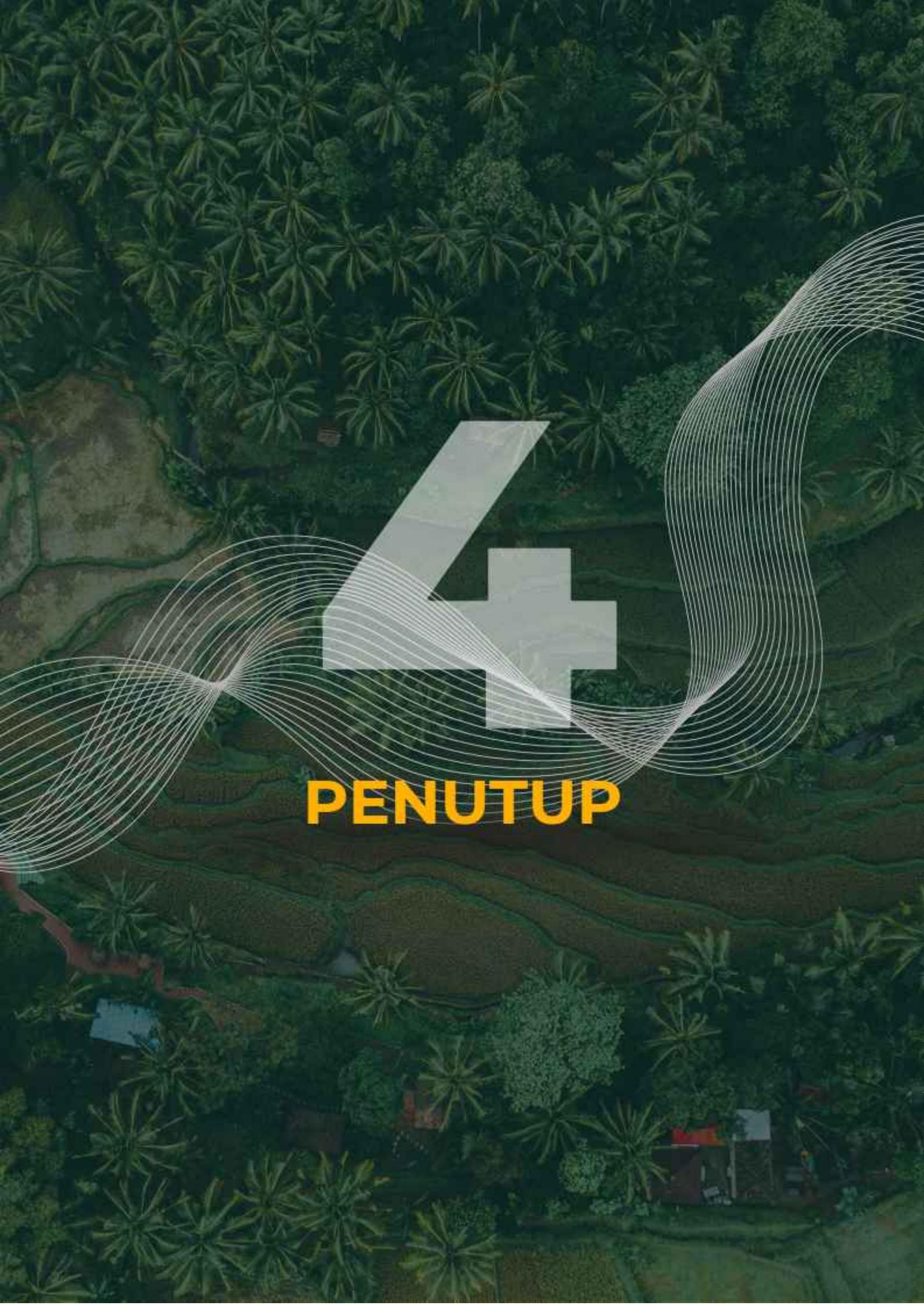
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan anggaran suatu instansi atau organisasi dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana perencanaan anggaran memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran meliputi capaian rincian output (CRO) dengan bobot 75%, penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10% dan Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
CRO	0	0	0	0	13,7	55,19	55,19	68,47	78,01	91,67	95	100
Penggunaan SBK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Efisiensi SBK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
NKPA	0	0	0	0	10,28	41,40	41,40	41,40	58,52	93,76	96,25	100

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja (Satker) dan Kementerian/Lembaga (K/L). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari 8 indikator yang terbagi dalam 3 bagian dengan masing-masing memiliki bobot yang berbeda. Penilaian IKPA terdiri dari Kualitas Perencanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA dan Halaman III DIPA, Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, dan Pengelolaan UP TUP; dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu Capaian Output. Indikator Dispensasi SPM menjadi pengurang yang perhitungannya secara kumulatif di Bulan Desember.

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Revisi DIPA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Halaman III DIPA	100	93,44	100	100	100	94,49	93,34	92,10	92,02	92,46	91,46	93,12
Penyerapan Anggaran	100	100	100	62,08	80,49	90,52	81,17	89,47	92,66	90,66	90,60	94,50
Belanja Kontraktual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Penyelesaian Tagihan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Pengelolaan UP TUP	100	98,28	99,36	98,20	98,81	98,71	98,70	98,31	98,43	98,43	98,38	98,02
Capaian Output	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Dispensasi SPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKPA	100	98,84	99,94	94,55	96,71	95,70	96,55	97,18	97,18	96,87	97,33	97,67



4+

PENUTUP

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Penyuluhan Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Penyuluhan dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Pusat Penyuluhan tahun 2024 sebesar 100% menunjukkan bahwa semua target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,98% dan nilai efisiensi capaian kinerja terhadap penggunaan anggaran sebesar 1 serta pencapaian kinerja telah dilakukan dengan efektif. Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa komitmen terhadap perbaikan kinerja dan inovasi-inovasi terus dijalankan untuk meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun. Hal ini juga mencerminkan upaya berkelanjutan Pusat Penyuluhan dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan Badan P2SDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Prinsip *Good Governance*, khususnya akuntabilitas dan transparansi, senantiasa menjadi landasan dalam pengelolaan kegiatan dan pelaporan, sebagaimana tercermin dalam Laporan Kinerja yang disusun.

Keberhasilan yang dicapai Tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran internal Pusat Penyuluhan dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, penghargaan dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian target dan pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2024.

Seiring dengan perubahan kelembagaan Badan P2SDM yang tentunya berpengaruh pula kepada kelembagaan pada Pusat Penyuluhan, yang semula berada dalam bagian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan, Pusat Penyuluhan siap menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan baru yang mungkin muncul. Dalam perubahan ini, peran Pusat Penyuluhan menjadi semakin terfokus untuk memastikan penguatan kapasitas Penyuluh Kehutanan yang mendukung pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Pusat Penyuluhan berkomitmen untuk mendorong keberhasilan perubahan ini melalui peningkatan kolaborasi, inovasi, dan optimalisasi sumber daya yang ada.

Semoga laporan ini tidak hanya menjadi refleksi atas capaian kinerja tahun 2024, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperbaiki perencanaan kinerja guna menentukan langkah-langkah strategis di masa mendatang. Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami hargai untuk mendukung kelancaran proses transisi kelembagaan dan peningkatan kinerja.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari seluruh pihak. Semoga kerja keras yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi keberlanjutan sektor kehutanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.







LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Rudianto, S.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Palguna Ruteka

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2023

Pihak Kedua,

Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Pihak Pertama,

Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENYULUHAN**

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal)	1.000 Orang
2.		Meningkatnya Kemandirian	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	100 Unit
3.		Kelembagaan Kelompok Masyarakat	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	50 Unit
Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya				
4.	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi KTH	0,5 Triliun
5.	Dukungan Manajemen dan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan	80 Poin
6.	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan	97,25 Poin

Klarifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal	1.000 Orang	2.400.000.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	KTH Mandiri yang terbentuk	100 Kelompok Masyarakat	1.600.000.000
	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	50 Kelompok Masyarakat	1.538.607.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran (Belanja Operasional)	1 Layanan	1.606.039.000
	Layanan Umum	1 Layanan	10.134.560.000
EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1 Paket	250.000.000
TOTAL			17.529.206.000

Jakarta, 1 Desember 2023

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM



Drs. A. Paiguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Kepala Pusat Penyuluhan



Wanju Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

**RENCANA AKSI TAHUN 2024
PUSAT PENYULUHAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Target Output Bulanan											
						Jan	Feb	Mar	April	Mei	Junl	Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	Des
Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Mandiri)	Kapasitas dan/atau Pendamping yang Mandiri	2.400.000.000	1.000	Orang	-	-	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Kelompok Masyarakat	Jumlah KTH (KTH Mandiri) Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LPZUS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	KTH Mandiri yang terbentuk Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/UPZUS yang terbentuk dan berkembang	1.600.000.000	100	Unit	-	-	-	-	10	20	40	60	70	80	90	100
Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya			1.538.607.000	50	Unit	-	-	-	-	10	15	20	25	30	35	40	50
Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya Nilai Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi KTH	-	0,5	Tribun	-	-	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan	Layanan Umum	10.134.560.000	80	Poin	-	-	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80
Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan			97,25	Poin	-	-	40	50	60	70	75	80	85	90	95	97,25

Jakarta, 1 Desember 2023
Kepala Pusat Penyuluhan


Wahyu Rudiantoko, S.Pi, M.Si
NIP. 19691016 199403 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Rudianto, S.Pi, M.Si

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Palguna Ruteka

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Desember 2024

Pihak Kedua,


Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Pihak Pertama,


Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENYULUHAN**

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Semula	Target Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal)	1.000 Orang	4.500 Orang
2.		Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	100 Unit	100 Unit
3.			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	50 Unit	50 Unit
Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya					
4.	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi KTH	0,5 Triliun	0,5 Triliun
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan	80 Poin	80 Poin
6.	Tugas Teknis Lainnya BP2SDM		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan	97,25 Poin	82,5 Poin

Klasifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO Semula	Target RO Menjadi	Anggaran (Rp)
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal	1.000 Orang	4.500 Orang	2.270.860.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	KTH Mandiri yang terbentuk	100 Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	1.553.640.000
	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	50 Kelompok Masyarakat	50 Kelompok Masyarakat	1.499.107.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran (Belanja Operasional)	1 Layanan	1 Layanan	1.630.039.000
	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	11.085.240.000
	Layanan BMN		1 Layanan	2.600.000
EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1 Paket	1 Paket	250.000.000
TOTAL				18.291.486.000

Jakarta, 12 Desember 2024

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM



Drs. A. Palguna Rujeka
NIP. 19650924 199303 1 001

Kepala Pusat Penyuluhan

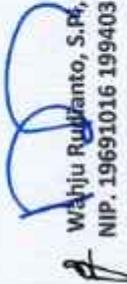


Wahju Rudianto S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

**REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2024
PUSAT PENYULUHAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp)	Target Menjadi	Satuan	Target Output Bulanan											
						Jan	Feb	Mar	Aprl	Mel	Juni	Juli	AgS	Sep	Oklt	Nov	Des
Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal	2.270.860.000	4.500	Orang	-	-	-	900	950	950	3470	3500	3500	4500	4500	4500
Meningkatnya Komandirian Kelombagian Masyarakat	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	KTH Mandiri yang terbentuk	1.553.640.000	100	Unit	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	100	100
	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang terbentuk dan berkembang	1.499.107.000	50	Unit	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya																	
Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Nilai Transaksi Ekonomi KTH	-	0,5	Triliun	0,05	0,07	0,1	0,12	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan	Layanan Umum Layanan BMN	11.085.240.000	80	Poin	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Nilai Anggaran Kinerja Pusat Penyuluhan		2.600.000	82,5	Poin	-	-	35	45	50	55	60	60	60	75	80	82,5

Jakarta, 12 Desember 2024
Kepala Pusat Penyuluhan


 Wahyu Rudianto, S.Pd, M.Si
 NIP. 19691016 199403 1 001



BP2SDM
KLHK

SCAN ME!



pusluh klhk



@pusluhklhk



@pusluhklhk



PUSLUH KLHK



pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id